

**PERANCANGAN MODEL KEMITRAAN BERMEDIASI
UNTUK MENINGKATKAN KEBERLANJUTAN USAHA
PETERNAKAN AYAM PETELUR SKALA KECIL
DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Disertasi

**TRI PRABOWO
2134171008**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

**PERANCANGAN MODEL KEMITRAAN BERMEDIASI
UNTUK MENINGKATKAN KEBERLANJUTAN USAHA
PETERNAKAN AYAM PETELUR SKALA KECIL
DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Oleh

Tri Prabowo

Disertasi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
DOKTOR

Pada
Program Studi Doktor Ilmu Pertanian

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

Usaha peternakan ayam petelur skala kecil di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lampung Timur, menghadapi berbagai tantangan struktural yang menghambat peningkatan produktivitas dan keberlanjutan usaha, antara lain ketimpangan hubungan kemitraan, ketergantungan terhadap mitra usaha, serta keterbatasan akses terhadap input produksi, pasar, dan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kemitraan bermediasi terhadap kinerja mediasi usaha, mengkaji dampaknya terhadap produktivitas dan keberlanjutan usaha, mengevaluasi implikasi finansial penerapan kemitraan bermediasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan pengembangan kemitraan yang berorientasi pada keberlanjutan peternakan ayam petelur skala kecil. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Lampung Timur dengan melibatkan 50 peternak ayam petelur skala kecil sebagai responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur, wawancara mendalam, dan *Focus Group Discussion* (FGD), serta dianalisis menggunakan pendekatan *mixed methods*. Analisis kuantitatif meliputi uji validitas dan reliabilitas, analisis jalur (*path analysis*) untuk menguji model mediasi, serta analisis kelayakan usaha berdasarkan indikator laba, Return on Investment (ROI), *Break Even Point* (BEP), dan rasio manfaat-biaya (B/C). Analisis kualitatif dilakukan melalui FGD dan SWOT–TOWS untuk merumuskan strategi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha peternakan ayam petelur skala kecil secara ekonomi masih layak dijalankan, dengan nilai B/C Ratio >1 dan ROI sebesar 17,06%, namun rentan terhadap fluktuasi harga input dan output. Model kemitraan bermediasi yang melibatkan peternak, mitra usaha, dan lembaga mediator netral terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap mekanisme mediasi usaha ($\beta = 0,283$; $p < 0,05$). Selanjutnya, mekanisme mediasi usaha berperan signifikan dalam meningkatkan produktivitas dan memperkuat keberlanjutan usaha, sehingga pengaruh kemitraan terhadap kinerja usaha bersifat dominan tidak langsung melalui mediasi. Tingkat penerimaan responden terhadap model yang diusulkan sangat tinggi, dengan 98,4% responden menyatakan setuju atau sangat setuju. Hasil FGD dan analisis SWOT–TOWS menghasilkan strategi implementatif berupa penguatan kelembagaan koperasi sebagai mediator, penyusunan regulasi kemitraan yang berkeadilan, integrasi riset dan pendampingan perguruan tinggi, transformasi digital kelembagaan, serta pengembangan skema pembiayaan inklusif. Secara keseluruhan, kemitraan bermediasi berpotensi menjadi strategi kelembagaan yang efektif untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat ketahanan ekonomi, dan mendorong keberlanjutan peternakan ayam petelur skala kecil.

Kata kunci: ayam petelur, kemitraan bermediasi, keberlanjutan, produktivitas, peternakan rakyat, Lampung Timur.

ABSTRACT

Small-scale layer poultry farming in Indonesia, particularly in East Lampung Regency, faces various structural challenges that constrain productivity improvement and business sustainability, including unequal partnership relations, dependence on business partners, and limited access to production inputs, markets, and technology. This study aims to analyze the role of mediated partnerships in improving the performance of business mediation, to examine their impacts on productivity and business sustainability, to evaluate the financial implications of implementing mediated partnerships, and to formulate policy recommendations for partnership development oriented toward the sustainability of small-scale layer poultry farming. The study was conducted in East Lampung Regency involving 50 small-scale layer farmers as respondents. Data were collected through structured questionnaires, in-depth interviews, and Focus Group Discussions (FGD), and analyzed using a mixed-methods approach. Quantitative analysis included validity and reliability tests, path analysis to examine the mediation model, and farm feasibility analysis based on profit, Return on Investment (ROI), Break Even Point (BEP), and Benefit–Cost (B/C) ratio indicators. Qualitative analysis was conducted through FGD and SWOT–TOWS analysis to formulate policy and strategic recommendations. The results indicate that small-scale layer farming remains economically feasible, as reflected by a B/C ratio greater than one and an ROI of 17.06%, although it is vulnerable to fluctuations in feed and egg prices. The mediated partnership model involving farmers, business partners, and neutral mediating institutions significantly improves business mediation mechanisms ($\beta = 0.283$; $p < 0.05$). Furthermore, business mediation mechanisms play a significant role in enhancing productivity and strengthening business sustainability, indicating that the impact of mediated partnerships on farm performance is predominantly indirect through mediation. Farmer acceptance of the proposed partnership model is very high, with 98.4% of respondents expressing agreement or strong agreement. The FGD and SWOT–TOWS analysis generated several implementable strategies, including strengthening cooperative institutions as mediators, establishing fair and transparent partnership regulations, integrating university-based research and technical assistance, promoting institutional digital transformation, and developing inclusive financing schemes for small-scale farmers. Overall, mediated partnerships have strong potential as an institutional strategy to enhance productivity, improve economic resilience, and promote the long-term sustainability of small-scale layer poultry farming.

Keywords: layer poultry, mediated partnership, sustainability, productivity, smallholder farming, East Lampung.

Perancangan Model Kemitraan Bermediasi untuk Meningkatkan Keberlanjutan Usaha Peternakan Ayam Petelur Skala Kecil di Kabupaten Lampung Timur

Dipersiapkan dan disusun oleh:

TRI PRABOWO
NPM 2134171008

Telah disetujui oleh:

Dr. Ir. Erwanto, M.S.

Promotor

Prof. Dr. Ir. Zainal Abidin, M.E.S.

Co-Promotor

Prof. Dr. Ir. Muhtarudin, M.S.

Co-Promotor

Prof. Dr. Ir. Slamet Budi Yuwono, M.S.

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Pertanian

Mengesahkan
Dekan Fakultas Pertanian

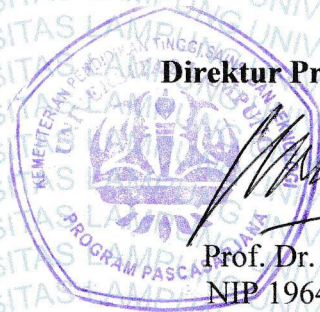
Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P.

NIP 1964111811989021002

Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.

NIP 196403261989021001



Perancangan Model Kemitraan Bermediasi untuk Meningkatkan Keberlanjutan Usaha Peternakan Ayam Petelur Skala Kecil di Kabupaten Lampung Timur

Dipersiapkan dan disusun oleh:

TRI PRABOWO

NPM 2134171008

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal: 11 Februari 2026

Dewan Penguji

Dr. Ir. Erwanto, M.S.

Promotor

Prof. Dr. Ir. Zainal Abidin, M.E.S.

Co-Promotor

Prof. Dr. Ir. Muhtarudin, M.S.

Co-Promotor

Dr. Ir. Rr. Riyanti, M.P.

Penguji

Prof. Dr. Ir. Slamet Budi Yuwono, M.S.

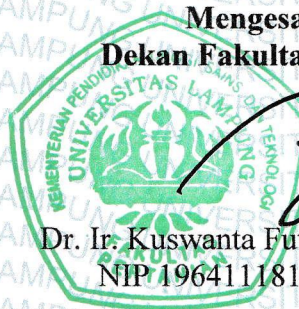
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Pertanian

Mengesahkan

Dekan Fakultas Pertanian

Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P.

NIP 1964111811989021002



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa disertasi yang berjudul **“Perancangan Model Kemitraan Bermediasi untuk Meningkatkan Keberlanjutan Usaha Peternakan Ayam Petelur Skala Kecil di Kabupaten Lampung Timur”** merupakan hasil karya sendiri dan bukan hasil karya orang lain. Semua hasil yang tertuang dalam disertasi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa disertasi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 11 Februari 2026
Penulis,



Tri Prabowo
NPM 2134171008

SANWACANA

Alhamdulillah rasa syukur Penulis panjatkan karena disertasi yang berjudul **“PERANCANGAN MODEL KEMITRAAN BERMEDIASI UNTUK MENINGKATKAN KEBERLANJUTAN USAHA PETERNAKAN AYAM PETELUR SKALA KECIL DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR”** dapat diselesaikan. Selama dalam proses penulisan disertasi ini, Penulis memperoleh bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga penyusunan disertasi dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung dan sebagai penguji disertasi atas saran dan masukan yang diberikan kepada Penulis.
2. Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P., selaku Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Lampung dan sebagai penguji disertasi atas saran yang telah diberikan kepada Penulis.
3. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung atas persetujuan pada disertasi ini.
4. Prof. Dr. Ir. Slamet Budi Yuwono, M.S., selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.
5. Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Si., selaku pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu berkonsultasi
6. Dr. Ir. Erwanto, M.S., selaku Promotor atas bimbingan dan saran selama masa studi.
7. Prof. Dr. Ir. Zainal Abidin, M.E.S., selaku Ko-Promotor 1 atas bantuan dan saran dalam penyelesaian disertasi.
8. Prof. Dr. Ir. Muhtarudin, M.S., selaku Ko-Promotor 2 atas ide, bantuan, dan saran dalam penyelesaian disertasi.

9. Dr. Ir. Riyanti, M.P., selaku pembahas yang memberikan banyak masukan pada penulisan disertasi ini.
10. Dr. Ir. Irmayani Noer, M.Si. yang telah bersedia menjadi penguji eksternal disertasi.
11. Seluruh keluarga besar Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lampung
12. Seluruh Staf Program Studi Doktor Ilmu Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung
13. Teman-teman satu angkatan atas semangat dan motivasi untuk dapat menyelesaikan studi tepat waktu dan semua pihak yang membantu kelancaran dalam penulisan disertasi ini.

Disertasi ini bukanlah karya yang sempurna, sehingga Penulis menerima segala bentuk saran demi kebaikan kita bersama. Semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan di bidang agribisnis peternakan.

Bandar Lampung, 11 Februari 2026
Penulis,

Tri Prabowo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	v
PERNYATAAN.....	vi
SANWACANA	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang dan Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.4.1 Manfaat bagi Peternak Rakyat	11
1.4.2 Manfaat bagi Agribisnis Ayam Petelur.....	11
1.4.3 Manfaat bagi Pembuat Kebijakan	11
1.4.4 Manfaat bagi Akademisi dan Peneliti	12
1.4.5 Manfaat bagi Masyarakat Luas	12
1.5 Luaran Penelitian	12
1.6 Nilai Kebaruan dan Kedalaman Penelitian	13
1.6.1 Pengembangan Model Kemitraan Bermediasi yang Belum Pernah Diimplementasikan pada Peternakan Ayam Petelur di Indonesia	13
1.6.2 Konseptualisasi Peran Mediator Kelembagaan sebagai Instrumen Pengawasan dan Fasilitator Hubungan Kemitraan.....	14
1.6.3 Integrasi Pendekatan Interdisipliner dalam Analisis Kemitraan Agribisnis.	14
1.6.4 Potensi Kontribusi terhadap Transformasi Sosial dan Pemberdayaan Peternak Kecil.....	14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	16
2.1 Teori Dasar Penelitian.....	16
2.1.1 Teori Kemitraan Kolaboratif.....	16
2.1.2 Teori Mediasi: Model Baron dan Kenny	18
2.1.3 Teori Triple Bottom Line (TBL).....	19

2.1.4 Teori Ketergantungan Sumber Daya (Resource Dependence Theory)	20
2.1.5 Teori Keadilan Sosial dalam Ekonomi Pertanian	22
2.1.6 Teori Sistem Agribisnis Terintegrasi	23
2.1.7 Teori Akses (Theory of Access)	24
2.2 Integrasi Teori dan Implementasi dalam Praktik Penelitian	26
2.3 Teori yang Diaplikasikan dalam Analisis Penelitian	27
2.4 Tinjauan Penelitian Terdahulu	28
2.5 Kerangka Pemikiran.....	30
2.6 Tinjauan Literatur dan Landasan Teoritis	35
2.6.1 Konsep Organisasi dan Kelembagaan.....	35
2.6.2 Konsep Kerjasama Kemitraan	38
2.6.3 Peran Mediator dalam Kemitraan	39
2.6.4 Korporasi Peternakan Rakyat.....	40
2.6.5 Optimalisasi Sumber Daya.....	41
2.6.6 Analisis Biaya Manfaat	42
2.6.7 Input Usaha Ternak	44
2.6.8 Proses Produksi, Pengolahan, Distribusi dan Pemasaran Ayam Petelur	44
2.6.9 Model dan Strategi Agribisnis	49
BAB III. METODE PENELITIAN	51
3.1 Desain dan Pendekatan Penelitian	51
3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian dan Variabel Kontekstual	52
3.3 Waktu dan Tempat Penelitian	54
3.4 Metode Penetapan Sampel	55
3.5 Jenis dan Sumber Data	56
3.6 Definisi Operasional Variabel.....	56
3.6.1 Variabel Independen	56
3.6.2 Variabel Mediasi	57
3.6.3 Variabel Dependen.....	57
3.7 Metode Analisis	57
3.7.1 Analisis Tujuan 1 dan 2	57
3.7.2 Analisis Finansial Usaha Peternakan Ayam Petelur Skala Kecil	59
BAB IV. KEADAAN UMUM WILAYAH STUDI	65
4.1 Uraian Lokasi Secara Geografis.....	65
4.2 Uraian Demografis	66
4.3 Uraian Perkembangan Agribisnis Ayam Petelur	67
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN	75
5.1 Karakteristik Responden	75
5.2 Peran Model Kemitraan Bermediasi terhadap Kinerja Mediasi Usaha pada Peternakan Ayam Petelur Skala Kecil.....	77
5.2.1 Hasil Penelitian	77
5.2.2 Pembahasan.....	81
5.3 Analisis Dampak Kemitraan Bermediasi terhadap Aspek Produktivitas dan Keberlanjutan Peternakan Ayam Petelur	84

5.3.1 Hasil Penelitian	84
5.3.2 Pembahasan.....	88
5.4 Implikasi Kinerja Finansial Penerapan Kemitraan Bermediasi terhadap Kinerja Usaha Peternakan Ayam Petelur Skala Kecil.	91
5.4.1 Hasil Penelitian	91
5.4.2 Pembahasan.....	96
5.5 Implikasi Kebijakan dan Strategi Pengembangan Model Kemitraan Bermediasi	103
5.5.1 Hasil Penelitian	103
5.5.2 Pembahasan.....	110
5.6 Pembahasan Umum.....	113
5.6.1 Peran Aktor dan SOP dalam Struktur Kemitraan Bermediasi	114
5.6.2 Peran Mediasi sebagai Mekanisme Operasional (M)	115
5.6.3 Syarat dan Ketentuan Mediator dalam Sistem Kemitraan Bermediasi	116
1. Syarat sebagai Mediator	116
2. Ketentuan Operasional Mediator.....	118
3. Peran Strategis Mediator dalam Kelayakan Finansial Usaha.....	119
5.6.4 Integrasi Peran–SOP dalam Kerangka X–M–Y.....	119
BAB VI. SIMPULAN DAN SARAN	124
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN.....	138

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Definisi operasional	52
2. Karakteristik responden	76
3. Uji validitas variabel struktur model kemitraan bermediasi dan mediasi usaha	79
4. Uji reliabilitas variabel struktur model kemitraan bermediasi dan mediasi usaha	79
5. Hasil uji koefisien heteroskedastisitas pada struktur model kemitraan bermediasi terhadap mediasi usaha	80
6. Dampak struktur model kemitraan bermediasi terhadap mediasi usaha	80
7. Uji validitas variabel model kemitraan bermediasi, produktivitas usaha, dan keberlanjutan usaha ternak ayam petelur	85
8. Uji reliabilitas variabel model kemitraan bermediasi, produktivitas usaha, dan keberlanjutan usaha ternak ayam petelur	85
9. Hasil uji koefisien heteroskedastisitas pada model kemitraan bermediasi terhadap produktivitas usaha peternak ayam petelur	86
10. Hasil uji koefisien heteroskedastisitas pada model kemitraan bermediasi terhadap keberlanjutan usaha peternak ayam petelur	86
11. Dampak model kemitraan bermediasi terhadap produktivitas usaha peternakan ayam petelur	87
12. Dampak model kemitraan bermediasi terhadap keberlanjutan usaha peternakan ayam petelur	88
13. Indikator Kinerja Finansial Usaha Peternakan Ayam Petelur Skala Kecil pada Periode Pra-Kemitraan, Penerapan, dan Pasca-Kemitraan Bermediasi	92
14. Analisis SWOT sistem kemitraan bermediasi pada usaha peternakan ayam petelur skala kecil	106
15. Matriks TOWS sebagai dasar perumusan strategi implementasi sistem kemitraan bermediasi	108
16. Peran Masing-masing Pihak dalam Sistem Kemitraan Bermediasi	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Lima provinsi penghasil telur ayam terbesar di Indonesia tahun 2022-2024	3
2. Diagram alir kerangka pemikiran.....	35
3. Esensi kelembagaan sistem kemitraan bermediasi.	37
4. Distribusi tingkat persetujuan responden terhadap struktur model kemitraan	78
5. Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion.	104
6. Struktur model kemitraan bermediasi pada usaha peternakan ayam petelur skala kecil.	114
7. Hubungan antara variabel-variabel utama dalam model kemitraan bermediasi	120

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Panduan Pengisian Kuesioner	138
2. Validitas dan Reliabilitas Model Kemitraan Bermediasi	149
3. Validitas dan Reliabilitas Peran Mediator.....	150
4. Validitas dan Reliabilitas Produktivitas Usaha	151
5. Validitas dan Reliabilitas Keberlanjutan Usaha.....	152
6. Analisis Usaha Tani Ternak Sebelum Menjalankan Sistem Kemitraan Bermediasi 5 tahun sebelum kemitraan	153
7. Analisis Usaha Tani Ternak Sebelum Menjalankan Sistem Kemitraan Bermediasi 5 tahun setelah kemitraan	154
8. Dokumentasi kegiatan FGD	155
9. Berita acara kegiatan FGD	156
10. Daftar hadir peserta FGD	157
11. LoA Publikasi Artikel pada Jurnal Terindeks Scopus Q4	158

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Sektor bisnis peternakan ayam petelur di Indonesia memiliki peranan yang sangat vital dalam mendukung ketahanan pangan, meningkatkan perekonomian masyarakat dan menyediakan sumber protein hewani yang terjangkau. Peningkatan ketahanan pangan merupakan prioritas utama dalam pembangunan. Ketahanan pangan merujuk pada situasi dimana kebutuhan pangan rumah tangga dapat dipenuhi secara memadai, baik dari segi kuantitas, kualitas, keamanan, distribusi yang merata, maupun keterjangkauannya (Undang-Undang No. 18 Tahun 2012). Batasan ketahanan pangan yang mengacu pada definisi ketahanan pangan yang berlaku di Indonesia mencakup terpenuhinya kebutuhan pangan bagi negara hingga ke tingkat perorangan dengan jumlah dan kualitas yang baik. Ketahanan pangan juga mencakup banyak aspek, mulai dari penyediaan dan distribusi hingga konsumsi. Ketahanan pangan tidak hanya menyangkut ketersediaan yang memadai, tetapi juga mencakup kemampuan individu atau rumah tangga dalam mengakses pangan, termasuk membelinya, serta kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan tanpa bergantung pada pihak lain.

Ketahanan pangan merupakan isu yang kompleks dan multidimensi, mencakup faktor sosial, ekonomi, politik, hingga lingkungan (Suryana, 2017). Dalam konteks ini, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dalam menyusun kebijakan pangan yang efektif untuk menjamin kecukupan pangan bagi seluruh penduduk. Meningkatnya kebutuhan pangan sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk (Khairati & Syahni, 2016). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2024^a), populasi Indonesia pada tahun tersebut mencapai 281,603 juta orang, menempati urutan ke-empat terbanyak di dunia. Hal ini berdampak bagi pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat. Tingginya jumlah penduduk berdampak pada tingginya

jumlah pangan untuk memenuhi gizi masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan telur sebagai sumber protein hewani. Dengan populasi yang terus meningkat, kebutuhan telur juga semakin meningkat.

Sebagai komoditas pangan, saat ini telur menjadi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Harga yang ditawarkan produk telur ayam ras sangat ekonomis dan terjangkau oleh semua kalangan masyarakat, sehingga telur dapat menjadi pilihan dalam memenuhi kebutuhan protein. Telur mengandung protein, vitamin, karbohidrat, fosfor, lemak, kalium, asam folat, yodium dan juga selenium dalam jumlah yang cukup (Yuwanta, 2010). Telur merupakan sumber protein berkualitas tinggi karena mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh. Oleh karena itu, protein dalam telur sering dijadikan standar untuk menilai kualitas protein dari bahan pangan lainnya (Azizah *et al.*, 2018). Terkait dengan penilaian kualitas protein ada istilah yang disebut protein setara telur (PST). Telur ayam mengandung 12,8 % protein dan 11,8 % lemak (Wulandari & Arif, 2022). Selain itu, telur ayam ras mengandung vitamin B6, B12, B1 dan B2 (Yuwanta, 2010).

Salah satu strategi untuk memenuhi kebutuhan telur secara nasional adalah dengan mendorong pengembangan usaha peternakan ayam ras. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2024^b), tercatat bahwa produksi telur ayam ras mengalami penurunan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Gambar 1). Meskipun demikian, Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren peningkatan produksi secara konsisten sejak tahun 2022 hingga 2024. Di sisi lain, wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa mencatatkan pertumbuhan produksi yang relatif lebih lambat. Dalam konteks ini, peran pemerintah menjadi sangat krusial dalam memacu pertumbuhan industri peternakan ayam ras, antara lain melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif agar sektor ini semakin kompetitif dan menarik bagi pelaku usaha. Selain itu, kebijakan yang diterapkan hendaknya mempertimbangkan kepentingan nasional secara holistik, baik dari aspek ketahanan pangan, pemerataan ekonomi, maupun keberlanjutan sektor peternakan.

Usaha ayam petelur (layer) di Indonesia merupakan sektor yang terus berkembang dan memiliki komponen yang cukup lengkap, mulai dari sektor hulu hingga hilir.

Ini ditunjukkan dengan adanya pabrik pakan ternak, perusahaan pembibitan, produsen obat-obatan hewan, peternakan layer, hingga unit pengolahan pasca panen. Meskipun demikian, sektor ini belum sepenuhnya terintegrasi secara menyeluruh. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah pengaturan keseimbangan antara pasokan dan permintaan dalam perencanaan produksi nasional. Perencanaan ini harus mempertimbangkan keberlangsungan usaha para pelaku di industri perunggasan, termasuk perusahaan besar (integrator), peternak mandiri, koperasi, dan pelaku usaha kecil lainnya.

Gambar 1. Lima provinsi penghasil telur ayam terbesar di Indonesia tahun 2022-2024. (Sumber: BPS, 2024^b).

Industri ayam ras harus bertumpu pada prinsip *economic of scale* yaitu dengan meningkatkan skala usaha sehingga diperoleh biaya rata-rata yang lebih rendah (Direktorat Pemasaran Domestik, 2012). Demikian halnya pada usaha ternak ayam petelur, perlu dilakukan integrasi agar hulu sampai hilir saling terkoneksi. Integrasi dalam industri ayam layer adalah upaya untuk menjalankan prinsip *economic of scale*. Mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, kegiatan peternakan dimungkinkan untuk dikembangkan secara terintegrasi dengan sektor lain, seperti budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, maupun bidang-bidang lain yang memiliki keterkaitan.

Penerapan sistem integrasi mendorong para pemilik modal bisnis ayam petelur untuk membangun integrasi secara vertikal. Integrasi vertikal terjadi ketika suatu kelompok usaha memperluas cakupan bisnisnya ke berbagai tahapan proses produksi (Golding & Murdock, 1997). Strategi ini dilakukan dengan menguasai rantai usaha dari tahap awal (hulu) hingga tahap akhir (hilir). Tujuan utama integrasi vertikal adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas peluang keuntungan. Dengan strategi ini, perusahaan dapat menghindari margin berlapis serta menekan biaya transaksi, sehingga pendapatan yang diperoleh menjadi lebih optimal.

Sistem integrasi vertikal menciptakan peluang monopoli bagi perusahaan atau korporasi besar (KPPU, 2021). Dengan permodalan yang besar, perusahaan atau korporasi dapat melakukan usaha peternakan dari hulu hingga hilir. Dengan demikian perusahaan atau korporasi dapat memegang kendali terhadap harga produk. Akan tetapi, berkembangnya integrasi vertikal dalam industri ayam layer justru mengakibatkan terhambatnya perkembangan usaha peternak rakyat. Hal ini terjadi karena dengan adanya integrasi secara vertikal dapat meningkatkan biaya yang harus ditanggung peternak rakyat untuk mengakses bibit, pakan dan obat-obatan. Selain itu, integrasi vertikal juga berdampak pada meningkatnya biaya akses distribusi penjualan yang dikeluarkan oleh pesaing, sehingga dapat menghambat usaha peternak rakyat untuk masuk dalam sebuah pasar.

Pemerintah telah mengambil langkah untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat melalui pengaturan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, khususnya Pasal 14. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat kesepakatan dengan pelaku usaha lain untuk menguasai sejumlah produk dalam satu rantai produksi barang dan/atau jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan masyarakat. Penerapan regulasi ini diharapkan menciptakan iklim usaha yang adil dan kompetitif, serta memberikan jaminan terhadap kesetaraan peluang bagi pelaku usaha besar, menengah, maupun kecil. Selain itu, persaingan yang sehat akan membentuk pasar yang lebih efisien dan dinamis, mendorong

terciptanya harga yang wajar, meningkatkan kualitas layanan kepada konsumen, dan pada akhirnya mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu cara menjaga keberlangsungan pelaku usaha ayam petelur skala kecil dan menengah di tengah persaingan global yang makin ketat dalam industri telur ayam adalah dengan membangun kerja sama kemitraan. Kerja sama kemitraan adalah hubungan kerja sama yang dibentuk berdasarkan perjanjian hukum antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Dalam sistem kerja sama ini, semua pihak memiliki kedudukan hukum yang setara dan saling membutuhkan satu sama lain untuk mencapai keuntungan bersama. Kemitraan melibatkan keterkaitan usaha yang dilandasi pada prinsip saling percaya dan menguntungkan. Masing-masing pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, seperti penyediaan modal, sumber daya, atau keahlian tertentu.

Kemitraan yang lazim diterapkan dalam peternakan ayam petelur adalah kemitraan inti plasma. Pola kemitraan inti plasma merupakan hubungan antara peternak, kelompok ternak dan perusahaan. Pola kemitraan inti plasma adalah suatu bentuk kerja sama antara perusahaan besar (inti) dan peternak kecil (plasma) yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam budidaya ayam petelur. Dalam kemitraan ini, perusahaan inti menyediakan berbagai sumber daya dan dukungan, sementara peternak plasma bertanggung jawab atas pemeliharaan ayam dan produksi telur.

Perusahaan inti menyediakan modal, bibit ayam (DOC), pakan, obat-obatan dan berbagai sarana produksi yang dibutuhkan oleh plasma. Perusahaan ini juga memiliki kewajiban dalam memberikan bimbingan teknis dan pelatihan dalam manajemen peternakan. Selain itu, perusahaan inti wajib menjamin pemasaran hasil produksi telur dari peternak plasma dengan harga yang telah disepakati. Sedangkan, peternak plasma melaksanakan pemeliharaan ayam sesuai dengan pedoman teknis yang diberikan perusahaan inti, menyiapkan fasilitas kandang yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dan menjual hasil produksi pada perusahaan inti.

Pada peternakan ayam petelur, pola kemitraan inti plasma memiliki risiko bagi peternak plasma. Hal ini karena adanya struktur kemitraan yang tidak seimbang

yaitu perusahaan inti memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan peternak plasma (Dewanto, 2005; Tampubolon, 2024). Dalam beberapa kasus, perusahaan inti juga memegang kendali terhadap harga produksi, sehingga peternak plasma memiliki posisi tawar yang lebih lemah dalam perjanjian kemitraan (Dewanto, 2005; Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, 2019). Selain itu, kesehatan ternak menjadi tanggung jawab peternak plasma, sehingga jika ternak terserang penyakit kerugian akan ditanggung oleh peternak plasma (Dewanto, 2005; Tampubolon, 2024). Profitabilitas juga sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga pakan dan biaya produksi. Peningkatan biaya produksi seringkali tidak diikuti dengan kenaikan harga produk, meskipun ada jaminan pemasaran dari perusahaan inti, sehingga peternak plasma sering kali mengalami kerugian (Tampubolon, 2024).

Tantangan terbesar bagi peternak plasma adalah kurangnya perlindungan hukum dalam perjanjian kemitraan. Peternak plasma tidak memiliki saluran hukum yang efektif untuk menuntut ganti rugi atau menyelesaikan perselisihan jika terjadi pelanggaran perjanjian oleh perusahaan inti. Peternak plasma juga menjadi sangat bergantung pada perusahaan inti dalam penyediaan bibit, pakan, dan obat-obatan. Peternak plasma akan mengalami kesulitan untuk melanjutkan usaha jika perusahaan inti gagal dalam memenuhi kewajiban. Dalam beberapa kasus, perusahaan inti dapat menghentikan pasokan secara tiba-tiba, sehingga operasional peternak plasma terganggu (Dewanto, 2005). Oleh karena itu, perlu adanya solusi yang dapat memberikan jaminan perlindungan bagi peternak kecil dalam menjalankan usaha peternakan ayam petelur.

Model kemitraan bermediasi dalam peternakan ayam petelur adalah pendekatan kerja sama yang melibatkan pihak ketiga sebagai mediator antara peternak dengan perusahaan besar. Tujuan dari model ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan hubungan bisnis yang lebih adil bagi semua pihak yang terlibat. Mediator memiliki peran penting dalam menjembatani komunikasi, memberikan informasi dan membantu dalam penyelesaian konflik antara peternak dengan perusahaan.

Struktur model kemitraan bermediasi terdiri atas peternak, dan perusahaan mitra, dan mediator. Peran mediator dapat dilaksanakan oleh lembaga pemerintah, organisasi non pemerintah (NGO), maupun perusahaan konsultan yang berpengalaman di dalam industri peternakan. Mediator bertugas dalam memberikan bimbingan teknis, pelatihan dan dukungan dalam pemasaran. Peternak kecil berperan sebagai pelaksana produksi sesuai dengan standar yang disepakati antara mediator dan juga perusahaan inti. Sedangkan perusahaan inti menjamin tersedianya DOC, pakan dan berbagai fasilitas produksi, serta menjamin pemasaran telur.

Model kemitraan bermediasi menawarkan pendekatan yang inovatif guna meningkatkan kolaborasi antara peternak kecil dan perusahaan besar. Keterlibatan pihak ketiga sebagai mediator membantu mengurangi risiko, meningkatkan efisiensi produksi dan menciptakan hubungan yang lebih adil antara semua pihak yang terlibat. Kesuksesan implementasi dari model ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan sektor peternakan secara berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan peternak di Indonesia.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas peran kemitraan dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha peternakan, sebagian besar studi masih berfokus pada model kemitraan konvensional yang bersifat dua pihak (*dyadic partnership*) antara perusahaan inti dan peternak. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya mampu menjelaskan ketimpangan relasi, keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, dan pasar yang kerap dialami oleh peternak skala kecil (Gafaruddin dan Arvan, 2025). Selain itu, banyak penelitian terdahulu yang masih menitikberatkan pada aspek teknis dan ekonomi dari hubungan kemitraan, tanpa menelaah secara mendalam faktor sosial, kelembagaan, serta mekanisme penyelesaian konflik yang berpengaruh terhadap keberlanjutan kerja sama.

Kesenjangan pengetahuan juga terlihat pada belum terintegrasinya dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kerangka analisis kemitraan agribisnis unggas. Padahal, keberlanjutan usaha peternakan ayam petelur skala kecil tidak hanya ditentukan oleh efisiensi ekonomi, tetapi juga oleh stabilitas sosial,

kepercayaan antar pihak, dan dukungan kelembagaan yang memadai. Minimnya kajian empiris mengenai peran pihak ketiga atau lembaga mediator sebagai variabel kunci dalam menjaga keadilan, transparansi, dan keseimbangan kekuasaan antara perusahaan inti dan peternak menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi. Hingga saat ini, penerapan model kemitraan bermediasi yang melibatkan lembaga independen masih sangat terbatas, baik dalam praktik maupun dalam literatur akademik di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengembangkan dan menganalisis model kemitraan bermediasi yang tidak hanya memperkuat aspek ekonomi, tetapi juga mengedepankan kolaborasi berbasis kepercayaan, keadilan, dan pemberdayaan peternak sebagai mitra strategis dalam rantai nilai agribisnis unggas yang berkelanjutan.

1.2 Identifikasi Masalah

Industri peternakan ayam petelur memiliki struktur yang terdiri dari tiga bagian yang saling terkait yaitu industri pembibitan, industri pakan dan obat-obatan, serta usaha peternakan atau produsen telur (Yusdja & Nasution, 1993). Industri-industri tersebut dapat diorganisasikan dalam sebuah perusahaan maupun dalam perusahaan yang terpisah. Sistem pengorganisasian tersebut akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian, terutama pada industri ayam petelur. Produk dari perusahaan pembibitan merupakan bahan baku bagi peternakan ayam petelur, sehingga penetapan harga dari satu industri akan mempengaruhi industri lainnya. Oleh karena itu, dalam pengembangan industri unggas diperlukan pengaturan harga sehingga dapat menjamin keberlanjutan peternakan terutama peternak skala kecil.

Keberlanjutan dan produktivitas usaha peternakan ayam petelur skala kecil sering dihadapkan dengan beberapa hambatan utama yaitu keterbatasan modal yang berdampak pada rendahnya kualitas pakan dan infrastruktur dalam peternakan, sehingga mempengaruhi produktivitas ayam petelur. Selain itu, peternak rakyat sulit untuk mendapatkan bibit ayam petelur yang berkualitas. Bibit ayam yang unggul dapat diperoleh dari perusahaan pembibitan (*breeder farm*) yang menerapkan manajemen pembibitan secara tepat dan terstandar. Hal ini mencakup

tingkat fertilitas dan daya tetas yang tinggi, sehingga mampu menghasilkan anak ayam yang sehat, memiliki laju pertumbuhan yang baik, serta potensi produktivitas yang optimal (Sari & Herdiyana, 2017).

Permintaan bibit ayam semakin tinggi, sehingga pemerintah Indonesia pernah melakukan impor bibit ayam petelur yang berdampak pada gejolak harga bibit ayam petelur. Selain itu, perusahaan-perusahaan besar mulai memegang kendali terhadap harga bibit ayam sehingga berdampak buruk bagi keberlanjutan peternak kecil. Demikian juga dengan harga pakan yang terus mengalami kenaikan, sedangkan harga telur ditingkat konsumen relatif stabil (Yusdja & Nasution, 1993). Kondisi ini tentunya sangat menyulitkan bagi peternak kecil dalam mengembangkan usahanya, selain terbatasnya modal dalam membeli bibit, pakan dan obat-obatan, akses yang terbatas dalam memperoleh bibit, pakan dan obat-obatan juga menjadi suatu masalah yang hingga kini belum ditemukan solusinya.

Perusahaan-perusahaan pembibitan dan pakan tidak melayani penjualan dalam skala kecil, sehingga membatasi akses peternak rakyat dan peternak skala kecil. Selain masalah modal dan juga akses bibit, pakan dan obat-obatan, kemampuan dalam mendapatkan akses ke pasar yang baik dan stabil juga menjadi kendala dalam peternakan ayam petelur rakyat. Akses pasar yang baik dipengaruhi oleh struktur tataniaga. Penyaluran telur dari peternak kekonsumen diperlukan tataniaga dengan rantai tataniaga terdiri dari produsen (peternak), kelompok jasa perantara dan konsumen. Setiap transaksi dalam kelompok tersebut memerlukan biaya transaksi dan biaya transportasi (Sasongko & Prasasta, 2018).

Pengembangan peternakan ayam petelur skala kecil perlu perhatian serius dari pemerintah terutama dalam pengendalian harga dan keterjaminan input usaha. Upaya tersebut penting untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan menghasilkan suatu ekosistem ekonomi pasar yang efektif. Sistem kemitraan bermediasi merupakan salah satu cara membangun keberlangsungan usaha peternakan ayam petelur skala kecil dan menengah. Kemitraan bermediasi melibatkan pihak ketiga sebagai mediator yang membantu menyelesaikan konflik

antara pihak pertama dan pihak kedua yang bekerja sama. Mediator memfasilitasi pencapaian kesepakatan tanpa berpihak.

Berdasarkan identifikasi yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kemitraan bermediasi terhadap kinerja mediasi usaha pada peternakan ayam petelur skala kecil?
2. Bagaimana pengaruh kemitraan bermediasi secara langsung dan tidak langsung terhadap produktivitas dan keberlanjutan usaha peternakan ayam petelur skala kecil?
3. Bagaimana implikasi finansial penerapan kemitraan bermediasi terhadap kinerja usaha peternakan ayam petelur skala kecil berdasarkan indikator laba, ROI, BEP, dan rasio manfaat-biaya?
4. Bagaimana rekomendasi kebijakan dan strategi pengembangan kemitraan bermediasi yang efektif untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan peternakan ayam petelur skala kecil?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Menganalisis peran kemitraan bermediasi terhadap kinerja mediasi usaha pada peternakan ayam petelur skala kecil.
2. Menganalisis pengaruh kemitraan bermediasi terhadap produktivitas dan keberlanjutan usaha peternakan ayam petelur skala kecil.
3. Mengevaluasi implikasi finansial penerapan kemitraan bermediasi terhadap kinerja usaha peternakan ayam petelur skala kecil berdasarkan indikator laba, ROI, BEP, dan rasio manfaat-biaya.
4. Menyusun rekomendasi kebijakan dan strategi pengembangan kemitraan bermediasi yang berorientasi pada peningkatan produktivitas dan keberlanjutan peternakan ayam petelur skala kecil. Belum terjawab dalam hasil penelitian

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat bagi Peternak Rakyat

Peternak dapat mengadopsi praktik terbaik dan teknologi modern yang meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi. Melalui kemitraan, peternak dapat memperoleh akses yang lebih baik ke pasar dan sumber daya finansial, yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan produktivitas dan efisiensi yang lebih tinggi, pendapatan peternak dapat meningkat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

1.4.2 Manfaat bagi Agribisnis Ayam Petelur

Industri agribisnis akan mendapatkan pasokan telur yang lebih stabil dan berkualitas, yang penting untuk memenuhi permintaan pasar. Model kemitraan bermediasi dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok dan mengurangi biaya operasional. Model kemitraan yang inklusif dan berkelanjutan dapat mendukung pertumbuhan jangka panjang industri agribisnis.

1.4.3 Manfaat bagi Pembuat Kebijakan

Disertasi ini diarahkan untuk memberikan landasan konseptual bagi perumusan kebijakan pengembangan peternakan ayam petelur skala kecil berbasis kemitraan bermediasi sebagai instrumen penguatan ekonomi pedesaan. Fokus kebijakan yang dikaji menekankan pentingnya penataan ulang pola kemitraan usaha peternakan agar tidak hanya berorientasi pada efisiensi produksi, tetapi juga menjamin keadilan hubungan usaha, transparansi transaksi, dan keberlanjutan usaha peternak skala kecil.

Secara spesifik, kajian ini relevan untuk mendukung penyusunan kebijakan kemitraan peternakan yang mengatur peran dan tanggung jawab aktor secara proporsional, termasuk penetapan standar kontrak kemitraan, mekanisme pembagian risiko usaha, serta sistem penetapan harga input dan output yang lebih transparan. Dalam konteks ini, keberadaan lembaga mediator kemitraan seperti koperasi peternak, BUMDes, atau lembaga pendamping independen dipandang sebagai bagian integral dari kebijakan, dengan fungsi utama sebagai penghubung

kepentingan peternak dan mitra usaha, fasilitator koordinasi, serta pengawas implementasi kesepakatan kemitraan.

Selain itu, disertasi ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan penguatan kelembagaan kemitraan, khususnya dalam meningkatkan kapasitas manajerial dan literasi usaha peternak, integrasi pendampingan teknis produksi dengan sistem kemitraan, serta perluasan akses pembiayaan berbasis kelembagaan. Kebijakan kemitraan bermediasi juga diarahkan untuk terintegrasi dengan program digitalisasi usaha peternakan, sistem pencatatan usaha, dan monitoring kinerja kemitraan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, disertasi ini menempatkan kemitraan bermediasi sebagai instrumen kebijakan strategis, tidak hanya untuk meningkatkan daya saing usaha peternakan ayam petelur skala kecil, tetapi juga sebagai pendekatan tata kelola usaha yang mendukung pembangunan ekonomi pedesaan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.4.4 Manfaat bagi Akademisi dan Peneliti

Disertasi ini akan menambah literatur akademik mengenai kemitraan bermediasi dan memberikan dasar bagi penelitian lanjutan. Studi kasus dan analisis dalam disertasi ini dapat menjadi model implementasi bagi penelitian dan proyek serupa di masa depan.

1.4.5 Manfaat bagi Masyarakat Luas

Melalui peningkatan pendapatan dan kesejahteraan peternak, masyarakat sekitar juga dapat merasakan dampak positif dalam bentuk peningkatan kualitas hidup. Produksi telur yang stabil dan berkualitas dapat membantu menjaga stabilitas harga di pasaran sehingga menguntungkan konsumen.

1.5 Luaran Penelitian

Penelitian ini menghasilkan beberapa luaran utama yang memiliki nilai ilmiah dan praktis tinggi, antara lain dokumen disertasi ilmiah, artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi, rekomendasi kebijakan implementatif, dan model

kemitraan bermediasi sebagai inovasi sosial. Disertasi memuat analisis komprehensif mengenai model kemitraan bermediasi dalam usaha peternakan ayam petelur skala kecil, termasuk kerangka teoritis, metodologi, hasil empiris, dan pembahasan mendalam yang dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu di bidang agribisnis dan peternakan. Publikasi ilmiah bertujuan agar penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi khalayak. Selain itu, penelitian ini juga menghasilkan rumusan kebijakan yang aplikatif dan berbasis bukti (*evidence-based policy*) untuk mendorong pengembangan dan implementasi sistem kemitraan bermediasi. Rekomendasi ini ditujukan kepada pemerintah daerah, Kementerian Pertanian, serta pemangku kepentingan lain guna mendukung keberlanjutan usaha peternak ayam petelur skala kecil. Sebagai kontribusi praktis, penelitian ini juga menghasilkan rancangan model kemitraan bermediasi yang dapat direplikasi atau diadaptasi oleh pemerintah, LSM, dan pelaku usaha dalam menciptakan kemitraan yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan.

1.6 Nilai Kebaruan dan Kedalaman Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baru baik secara teoretis maupun praktis terhadap pengembangan model kemitraan agribisnis unggas, khususnya pada peternakan ayam petelur skala kecil di Indonesia. Nilai kebaruan (*novelty*) yang menjadi dasar dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.6.1 Pengembangan Model Kemitraan Bermediasi yang Belum Pernah Diimplementasikan pada Peternakan Ayam Petelur di Indonesia

Penelitian ini akan mengembangkan model kemitraan bermediasi yang melibatkan lembaga mediator independen sebagai pihak ketiga dalam hubungan antara peternak kecil dan perusahaan mitra. Model ini bersifat baru karena selama ini kemitraan di sektor peternakan ayam petelur umumnya hanya melibatkan dua pihak (*dyadic partnership*) tanpa kehadiran mediator. Dengan memperkenalkan peran mediator, penelitian ini diharapkan dapat menawarkan rancangan kelembagaan yang lebih adil dan transparan serta meningkatkan posisi tawar peternak kecil dalam sistem kemitraan.

1.6.2 Konseptualisasi Peran Mediator Kelembagaan sebagai Instrumen Pengawasan dan Fasilitator Hubungan Kemitraan

Kehadiran mediator dalam penelitian ini akan dikaji sebagai mekanisme kelembagaan yang berfungsi menjembatani komunikasi, mengawasi pelaksanaan kontrak, serta memediasi potensi konflik antar pihak. Inovasi ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pembentukan tata kelola kemitraan yang lebih kolaboratif, serta menjadi dasar konseptual bagi pengembangan kebijakan kemitraan agribisnis yang berkelanjutan di Indonesia.

1.6.3 Integrasi Pendekatan Interdisipliner dalam Analisis Kemitraan Agribisnis.

Penelitian ini menggabungkan perspektif ekonomi, sosial, dan lingkungan (*triple bottom line approach*) dalam kerangka analisis kemitraan agribisnis. Integrasi ketiga dimensi tersebut diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika kemitraan, mencakup efisiensi ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan interdisipliner ini menjadi nilai tambah yang membedakan penelitian ini dari studi-studi sebelumnya yang cenderung fokus pada aspek ekonomi semata.

1.6.4 Potensi Kontribusi terhadap Transformasi Sosial dan Pemberdayaan Peternak Kecil.

Melalui pengembangan model kemitraan bermediasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan arah baru dalam upaya pemberdayaan peternak kecil. Peran mediator diproyeksikan dapat memperkuat kapasitas peternak dalam bernegosiasi, membangun kepercayaan dengan perusahaan mitra, serta meningkatkan partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, model yang dikembangkan diharapkan mampu mendukung transformasi struktur kemitraan menjadi lebih partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, nilai kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengembangkan model kemitraan bermediasi yang bersifat konseptual dan aplikatif sebagai solusi alternatif terhadap keterbatasan model kemitraan konvensional yang ada saat ini. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya

memperkaya literatur akademik tentang kemitraan agribisnis, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pengambil kebijakan dan pelaku industri peternakan ayam petelur di Indonesia.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Teori Dasar Penelitian

Penelitian mengenai model kemitraan bermediasi dalam usaha peternakan ayam petelur skala kecil berakar pada berbagai teori yang saling melengkapi. Teori-teori ini digunakan untuk memahami secara komprehensif hubungan antar aktor dalam sistem agribisnis peternakan, dinamika struktur kemitraan, proses mediasi, serta dampaknya terhadap keberlanjutan usaha. Pemilihan teori yang beragam ini dimaksudkan untuk menyusun kerangka konseptual yang kuat dan relevan dengan kondisi di lapangan.

2.1.1 Teori Kemitraan Kolaboratif

Teori kemitraan kolaboratif merupakan kerangka konseptual penting dalam menjelaskan bagaimana berbagai aktor yang memiliki kepentingan, sumber daya, dan tingkat kekuasaan yang berbeda dapat bekerja sama secara produktif dalam suatu sistem ekonomi atau agribisnis. Wood dan Gray (1991) mendefinisikan kolaborasi sebagai proses kolektif di mana aktor-aktor yang otonom berinteraksi secara formal dan berkelanjutan untuk merumuskan, mengambil, dan melaksanakan keputusan yang diarahkan pada pencapaian tujuan bersama yang tidak dapat dicapai secara individual. Kolaborasi dalam perspektif ini tidak semata-mata bersifat kontraktual, tetapi merupakan bentuk tata kelola bersama (*shared governance*) yang menuntut kepercayaan, komitmen, dan pembagian tanggung jawab yang jelas antaraktor.

Dalam konteks agribisnis, khususnya usaha peternakan ayam petelur skala kecil, kemitraan kolaboratif melibatkan peternak, perusahaan mitra, lembaga pembiayaan, penyedia input, serta pemerintah sebagai regulator dan fasilitator.

Ansell dan Gash (2008) menekankan bahwa keberhasilan kemitraan kolaboratif ditentukan oleh adanya dialog tatap muka yang intensif, kepemimpinan fasilitatif, kesetaraan partisipasi, serta mekanisme akuntabilitas dan transparansi yang memadai. Prinsip-prinsip tersebut menjadi sangat relevan pada subsektor peternakan ayam petelur yang sangat bergantung pada koordinasi rantai pasok, stabilitas pasokan input, serta kepastian pasar hasil produksi.

Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa praktik kemitraan di sektor peternakan rakyat sering berkembang dalam relasi yang bersifat asimetris dan hierarkis, di mana perusahaan mitra memiliki posisi tawar yang lebih kuat dibandingkan peternak skala kecil (Eaton & Shepherd, 2001; Bijman, 2008). Kemitraan yang bersifat dominatif dan transaksional cenderung membatasi ruang partisipasi peternak dalam pengambilan keputusan, memperbesar ketergantungan struktural, serta menimbulkan ketimpangan dalam distribusi risiko dan keuntungan usaha.

Teori kemitraan kolaboratif menegaskan bahwa keberlanjutan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh keseimbangan kekuasaan (*power balance*) dan kualitas institusi yang mengatur interaksi antaraktor. Emerson, Nabatchi *et al.* (2012) menyatakan bahwa kolaborasi yang efektif membutuhkan kerangka institusional yang mampu memfasilitasi pembentukan kepercayaan, pengelolaan konflik, serta penyalarsan kepentingan secara berkelanjutan. Dalam kondisi relasi yang timpang, keterlibatan pihak ketiga yang bersifat netral menjadi mekanisme penting untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam kemitraan.

Oleh karena itu, dalam konteks peternakan ayam petelur skala kecil, penerapan teori kemitraan kolaboratif perlu dikembangkan melalui pendekatan kemitraan bermediasi, yaitu model kemitraan yang melibatkan lembaga mediator independen seperti koperasi, BUMDes, atau lembaga pendamping lainnya. Peran mediator tidak hanya sebagai penghubung administratif, tetapi juga sebagai fasilitator koordinasi, penjaga transparansi, penyeimbang relasi kekuasaan, serta pengawas implementasi kesepakatan kemitraan. Dengan adanya mekanisme mediasi, kemitraan kolaboratif diharapkan dapat bertransformasi dari hubungan yang

bersifat dominatif menjadi hubungan yang partisipatif, adil, dan berorientasi pada peningkatan kinerja serta keberlanjutan usaha peternak skala kecil.

Dengan demikian, teori kemitraan kolaboratif memberikan landasan konseptual yang kuat bagi pengembangan model kemitraan bermediasi dalam penelitian ini, sekaligus menjelaskan relevansi peran mediator dalam meningkatkan kualitas hubungan kemitraan, efektivitas koordinasi usaha, dan kinerja ekonomi peternakan ayam petelur skala kecil.

2.1.2 Teori Mediasi: Model Baron dan Kenny

Dalam penelitian ini, kerangka analisis mediasi yang dikembangkan oleh Baron dan Kenny (1986) digunakan untuk memahami mekanisme hubungan kausal dalam model kemitraan peternakan yang dikaji. Model mediasi ini menekankan bahwa pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen tidak selalu bersifat langsung, melainkan dapat berlangsung melalui satu atau lebih variabel perantara (*mediating variables*) yang berfungsi menjelaskan proses atau mekanisme terjadinya pengaruh tersebut. Dengan demikian, variabel mediasi berperan sebagai “jembatan konseptual” yang menghubungkan sebab dan akibat dalam suatu model analisis.

Dalam konteks penelitian ini, struktur kemitraan diposisikan sebagai variabel independen yang diasumsikan memengaruhi keberlanjutan usaha peternakan ayam petelur sebagai variabel dependen. Namun, pengaruh tersebut tidak terjadi secara serta-merta, melainkan dimediasi oleh sejumlah variabel antara, seperti efisiensi produksi, akses terhadap pasar dan sarana input, serta tingkat keberdayaan peternak. Struktur kemitraan yang baik diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penggunaan input, menekan biaya produksi, memperluas akses peternak terhadap pasar dan sumber daya, serta memperkuat posisi tawar dan kapasitas pengambilan keputusan peternak dalam sistem kemitraan.

Secara operasional, model Baron dan Kenny (1986) mensyaratkan beberapa tahapan pengujian untuk membuktikan adanya efek mediasi. Tahap pertama adalah pengujian hubungan langsung antara struktur kemitraan dan keberlanjutan usaha

peternakan. Tahap kedua menguji pengaruh struktur kemitraan terhadap variabel mediasi, seperti efisiensi produksi, akses pasar dan input, serta pemberdayaan peternak. Tahap ketiga menguji pengaruh variabel mediasi terhadap keberlanjutan usaha. Mediasi dinyatakan terjadi apabila variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel mediasi, variabel mediasi berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, serta pengaruh langsung struktur kemitraan terhadap keberlanjutan usaha melemah atau menjadi tidak signifikan setelah variabel mediasi dimasukkan ke dalam model analisis.

Pendekatan mediasi ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika keberlanjutan usaha peternakan, karena memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mengidentifikasi hubungan sebab-akibat secara langsung, tetapi juga menjelaskan proses internal yang memperkuat atau melemahkan pengaruh tersebut. Dengan menggunakan model Baron dan Kenny, penelitian ini dapat menguji secara empiris apakah keberlanjutan usaha peternak lebih banyak dipengaruhi oleh bentuk kemitraan itu sendiri atau oleh peningkatan efisiensi, akses pasar, dan pemberdayaan peternak yang dihasilkan dari struktur kemitraan tersebut. Oleh karena itu, analisis mediasi menjadi alat analisis yang relevan untuk menjelaskan peran strategis kemitraan bermediasi dalam mendorong keberlanjutan usaha peternakan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

2.1.3 Teori Triple Bottom Line (TBL)

Kerangka keberlanjutan yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada pendekatan *Triple Bottom Line* (TBL) yang diperkenalkan oleh Elkington (1997). Pendekatan TBL menegaskan bahwa keberlanjutan suatu usaha tidak dapat dinilai hanya dari capaian kinerja ekonomi (*profit*), melainkan harus secara simultan mempertimbangkan dimensi sosial (*people*) dan lingkungan (*planet*). Konsep ini menempatkan keberlanjutan sebagai hasil dari keseimbangan antara keuntungan finansial, tanggung jawab sosial, dan kelestarian lingkungan, sehingga mendorong praktik usaha yang berorientasi jangka panjang dan beretika (Elkington, 2018).

Dalam konteks peternakan ayam petelur, dimensi ekonomi keberlanjutan mencakup efisiensi biaya produksi, stabilitas pendapatan, produktivitas ternak,

serta tingkat profitabilitas usaha yang mampu menjamin kelangsungan operasional peternak. Dimensi sosial meliputi aspek keadilan dalam hubungan kemitraan, kesejahteraan peternak dan tenaga kerja, kondisi kerja yang layak, serta keterlibatan dan penerimaan masyarakat sekitar terhadap aktivitas peternakan. Sementara itu, dimensi lingkungan berfokus pada pengelolaan limbah peternakan yang ramah lingkungan, pengurangan emisi dan bau, pemanfaatan pakan yang lebih alami dan berkelanjutan, serta efisiensi penggunaan energi dan sumber daya alam lainnya (Sustainable Agriculture Initiative, 2014; FAO, 2017).

Penerapan kerangka TBL dalam penelitian ini menjadi penting untuk menghindari bias penilaian yang hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata. Dengan menggunakan perspektif TBL, model kemitraan bermediasi yang dikaji diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan peternak, penguatan hubungan sosial yang adil dan setara, serta pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, TBL berfungsi sebagai landasan konseptual yang relevan dan komprehensif dalam mengevaluasi keberlanjutan sistem kemitraan peternakan ayam petelur secara holistik dan terintegrasi.

2.1.4 Teori Ketergantungan Sumber Daya (Resource Dependence Theory)

Teori Ketergantungan Sumber Daya (*Resource Dependence Theory*/RDT) dikembangkan oleh Pfeffer dan Salancik (1978) untuk menjelaskan bagaimana organisasi sangat dipengaruhi oleh ketergantungannya terhadap sumber daya eksternal yang berada di luar kendali langsung organisasi tersebut. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa tidak ada organisasi yang sepenuhnya mandiri; kelangsungan hidup dan kinerja organisasi sangat ditentukan oleh kemampuannya memperoleh dan mengelola sumber daya penting seperti modal, bahan baku, teknologi, informasi, serta akses pasar. Ketergantungan terhadap sumber daya ini menciptakan hubungan kekuasaan (*power relations*) yang asimetris antara aktor yang mengendalikan sumber daya dan aktor yang membutuhkannya.

Dalam konteks agribisnis, khususnya peternakan skala kecil, kondisi ketergantungan sumber daya menjadi sangat nyata. Peternak kecil umumnya menghadapi keterbatasan akses terhadap permodalan, teknologi produksi, sarana

dan prasarana, informasi harga, serta jaringan pemasaran. Keterbatasan ini menyebabkan peternak berada pada posisi tawar yang lemah dalam berinteraksi dengan perusahaan inti atau mitra usaha yang memiliki kontrol lebih besar atas rantai pasok, penentuan harga, dan sistem kontrak. Menurut perspektif RDT, kondisi ini menciptakan ketergantungan struktural yang berpotensi memperkuat dominasi perusahaan mitra dan membatasi otonomi pengambilan keputusan peternak (Pfeffer & Salancik, 1978; Hillman *et al.*, 2009).

Ketergantungan sumber daya yang tinggi juga membuka peluang terjadinya praktik relasi kemitraan yang tidak seimbang, di mana perusahaan mitra dapat memanfaatkan posisinya untuk menetapkan persyaratan kontrak yang kurang menguntungkan bagi peternak, seperti penentuan harga sepihak, skema pembagian risiko yang tidak proporsional, serta ketergantungan berulang terhadap input produksi yang disediakan oleh perusahaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menghambat keberlanjutan usaha peternak, baik secara ekonomi maupun sosial, serta memperlemah kapasitas adaptasi peternak terhadap perubahan pasar dan lingkungan usaha.

Oleh karena itu, keberadaan mediator dalam model kemitraan bermediasi menjadi sangat relevan dalam perspektif Teori Ketergantungan Sumber Daya. Mediator berfungsi sebagai aktor institusional yang dapat membantu mengurangi tingkat ketergantungan peternak terhadap satu sumber daya atau satu aktor dominan. Peran mediator meliputi fasilitasi akses terhadap pasar alternatif, sumber permodalan, dan informasi teknis; penguatan kapasitas negosiasi dan literasi kontraktual peternak; serta pengawasan terhadap implementasi kesepakatan kemitraan agar berlangsung secara adil dan transparan. Dengan demikian, mediator berperan sebagai penyeimbang relasi kekuasaan dan mekanisme pengurangan ketimpangan struktural dalam sistem kemitraan agribisnis.

Melalui pendekatan RDT, penelitian ini memandang bahwa keberlanjutan usaha peternakan tidak hanya ditentukan oleh efisiensi teknis dan keuntungan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan sistem kemitraan untuk mengelola dan mendistribusikan sumber daya secara lebih adil. Model kemitraan bermediasi

diposisikan sebagai strategi institusional untuk mengurangi ketergantungan yang berlebihan, meningkatkan kemandirian peternak, serta menciptakan hubungan kemitraan yang lebih seimbang, adaptif, dan berkelanjutan.

2.1.5 Teori Keadilan Sosial dalam Ekonomi Pertanian

Teori keadilan sosial dalam ekonomi pertanian berangkat dari prinsip bahwa sistem ekonomi tidak semata-mata bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi dan keuntungan, tetapi juga harus menjamin distribusi manfaat yang adil serta perlindungan terhadap kelompok yang rentan, seperti petani dan peternak skala kecil. Dalam perspektif ini, pembangunan pertanian dipandang sebagai proses sosial yang harus memperhatikan relasi kekuasaan, akses terhadap sumber daya, serta kesetaraan hak antar pelaku dalam rantai nilai agribisnis (Rawls, 1971; Narayanan, 2014).

Dalam konteks kemitraan agribisnis, keberhasilan suatu kerja sama tidak cukup diukur dari keberadaan kontrak formal atau peningkatan output produksi semata. Kemitraan yang berkeadilan mensyaratkan adanya struktur institusional yang menjamin pemenuhan hak-hak petani secara substantif, termasuk transparansi informasi terkait harga dan kualitas produk, kebebasan untuk bernegosiasi secara setara, serta adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan mudah diakses. Tanpa jaminan tersebut, kontrak kemitraan berpotensi menjadi alat legalisasi ketimpangan, di mana pihak yang lebih kuat secara ekonomi dan institusional cenderung mendominasi proses pengambilan keputusan dan pembagian manfaat (Sen, 1999).

Teori keadilan sosial juga menekankan pentingnya partisipasi aktif petani dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan dan usaha mereka. Partisipasi ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk keterlibatan nyata dalam perumusan kesepakatan, evaluasi pelaksanaan kemitraan, serta perbaikan mekanisme kerja sama secara berkelanjutan. Dalam kerangka ini, keadilan dipahami tidak hanya sebagai hasil (*distributive justice*), tetapi juga sebagai proses (*procedural justice*) yang menjamin kesetaraan perlakuan dan suara bagi seluruh pihak yang terlibat.

Keberadaan mediator dalam model kemitraan bermediasi menjadi elemen kunci dalam penerapan prinsip keadilan sosial. Mediator berperan sebagai pengawal nilai-nilai keadilan dengan memfasilitasi forum diskusi yang partisipatif, menyediakan dan menyebarluaskan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh petani, serta menjembatani konflik yang muncul antara petani dan perusahaan mitra. Selain itu, mediator dapat membantu memperkuat kapasitas petani dalam memahami kontrak, meningkatkan literasi hukum dan ekonomi, serta mendorong terciptanya mekanisme pengawasan bersama terhadap implementasi kemitraan. Dengan demikian, mediator tidak hanya berfungsi sebagai penengah konflik, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan yang berkontribusi pada terciptanya sistem kemitraan agribisnis yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

2.1.6 Teori Sistem Agribisnis Terintegrasi

Teori Sistem Agribisnis Terintegrasi dikembangkan oleh Downey dan Erickson (1987) yang memandang sektor pertanian dan peternakan sebagai suatu sistem yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Dalam kerangka ini, agribisnis terdiri atas rangkaian subsistem yang meliputi penyediaan input produksi, kegiatan produksi di tingkat usaha tani atau peternakan, pengolahan hasil, distribusi, serta pemasaran. Kinerja dan keberlanjutan agribisnis secara keseluruhan sangat ditentukan oleh tingkat keterpaduan dan koordinasi antar subsistem tersebut, bukan hanya oleh efisiensi pada satu subsistem secara parsial.

Dalam praktiknya, peternak kecil umumnya hanya terlibat secara dominan pada subsistem produksi, sementara subsistem input, pengolahan, distribusi, dan pemasaran sering kali dikuasai oleh aktor lain yang memiliki kapasitas modal, teknologi, dan jaringan pasar yang lebih kuat. Keterbatasan akses peternak terhadap subsistem hilir menyebabkan lemahnya integrasi vertikal, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya efisiensi usaha, tingginya ketidakpastian harga, serta meningkatnya risiko kerugian pasca produksi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa permasalahan utama peternakan skala kecil tidak hanya terletak pada aspek teknis produksi, tetapi juga pada lemahnya keterhubungan dalam sistem agribisnis secara keseluruhan (Downey & Erickson, 1987; Jackson, 1968).

Dalam perspektif sistem agribisnis terintegrasi, kemitraan dipandang sebagai salah satu instrumen kelembagaan yang dapat menjembatani keterpisahan antar subsistem. Namun demikian, kemitraan konvensional sering kali belum mampu menciptakan integrasi yang seimbang karena dominasi aktor tertentu dalam pengambilan keputusan dan aliran informasi. Oleh karena itu, model kemitraan bermediasi diharapkan mampu berperan lebih efektif dalam mengintegrasikan seluruh subsistem agribisnis melalui mekanisme koordinasi yang difasilitasi oleh mediator. Mediator berfungsi untuk menyelaraskan kepentingan antar pelaku, memastikan kelancaran aliran input dan informasi, serta memperkuat hubungan antara subsistem produksi dengan subsistem pengolahan dan pemasaran.

Dengan adanya integrasi yang lebih baik, proses produksi di tingkat peternak dapat berlangsung secara lebih efisien, risiko usaha dapat ditekan, dan hasil produksi memiliki kepastian penyerapan pasar dengan harga yang lebih stabil. Selain itu, integrasi sistem agribisnis melalui kemitraan bermediasi juga berpotensi meningkatkan nilai tambah produk, memperpendek rantai distribusi, serta memperkuat posisi tawar peternak dalam rantai nilai. Dengan demikian, teori sistem agribisnis terintegrasi memberikan landasan konseptual yang kuat untuk menjelaskan peran strategis kemitraan bermediasi dalam mendorong efisiensi, stabilitas usaha, dan keberlanjutan agribisnis peternakan secara menyeluruh.

2.1.7 Teori Akses (Theory of Access)

Teori Akses (*Theory of Access*) yang dikemukakan oleh Ribot dan Peluso (2003) memperluas pemahaman mengenai penguasaan dan pemanfaatan sumber daya dengan menekankan bahwa kepemilikan formal bukanlah satu-satunya penentu kemampuan individu atau kelompok untuk memperoleh manfaat dari suatu sumber daya. Teori ini mendefinisikan akses sebagai “kemampuan untuk memperoleh manfaat dari sesuatu,” yang dapat terwujud melalui berbagai mekanisme selain hak kepemilikan, seperti relasi sosial, kekuasaan, pengetahuan, teknologi, dan dukungan kelembagaan. Dengan demikian, teori akses memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam menganalisis ketimpangan struktural yang dialami oleh kelompok kecil atau lemah dalam sistem ekonomi.

Dalam konteks peternakan skala kecil, keterbatasan akses sering kali menjadi faktor utama yang membatasi kinerja dan keberlanjutan usaha. Peternak kecil umumnya menghadapi hambatan dalam mengakses pakan berkualitas, bibit ayam unggul, teknologi kandang yang efisien, informasi harga yang transparan, serta jaringan pemasaran yang stabil. Keterbatasan akses tersebut tidak selalu disebabkan oleh ketiadaan kepemilikan formal, melainkan oleh lemahnya posisi peternak dalam jaringan sosial dan ekonomi, rendahnya literasi teknologi dan pasar, serta terbatasnya dukungan kelembagaan yang mampu menjembatani kebutuhan peternak dengan sumber daya yang tersedia (Ribot & Peluso, 2003; Hall *et al.*, 2011).

Teori akses juga menekankan bahwa akses bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh relasi kekuasaan antar aktor dalam suatu sistem. Dalam sistem kemitraan agribisnis, perusahaan inti sering kali memiliki kontrol yang lebih besar terhadap aliran informasi, teknologi, dan pasar, sehingga peternak berada pada posisi sebagai penerima pasif. Kondisi ini berpotensi membatasi ruang gerak peternak dalam mengambil keputusan strategis dan meningkatkan ketergantungan jangka panjang. Oleh karena itu, peningkatan akses peternak terhadap berbagai sumber daya menjadi prasyarat penting untuk memperkuat kemandirian dan keberlanjutan usaha peternakan.

Dalam model kemitraan bermediasi, mediator diposisikan sebagai aktor strategis yang mampu memperluas dan memperkuat akses peternak terhadap sumber daya kunci. Mediator dapat berperan dalam memfasilitasi pelatihan dan peningkatan kapasitas teknis peternak, memperkuat organisasi atau kelembagaan peternak, serta menghubungkan peternak dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti penyedia input, lembaga keuangan, lembaga riset, dan pasar. Melalui peran tersebut, mediator tidak hanya membantu meningkatkan akses secara individual, tetapi juga mendorong terbentuknya akses kolektif yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, teori akses memberikan landasan konseptual yang relevan untuk menjelaskan bagaimana kemitraan bermediasi dapat meningkatkan kemampuan peternak dalam memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan kelembagaan secara lebih adil dan berkelanjutan.

2.2 Integrasi Teori dan Implementasi dalam Praktik Penelitian

Agar teori-teori dasar yang telah diuraikan sebelumnya dapat dioperasionalkan dalam praktik penelitian, diperlukan jembatan konseptual yang memungkinkan integrasi antara konsep teoritis dan realitas empirik. Dalam hal ini, pendekatan *systems thinking* digunakan untuk memahami kompleksitas hubungan dalam model kemitraan bermediasi. Pendekatan ini memandang sistem sosial, seperti kemitraan peternakan, sebagai suatu kesatuan yang terdiri atas elemen-elemen yang saling terhubung dan saling memengaruhi, sehingga perlu dianalisis secara holistik (Checkland, 1981). Dengan demikian, interaksi antara peternak kecil, mitra usaha, dan mediator dipahami sebagai jaringan yang saling bergantung, di mana perubahan pada salah satu komponen dapat memengaruhi sistem secara keseluruhan.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun dengan menggabungkan tiga elemen utama, yaitu: struktur kemitraan (meliputi aktor, kontrak, dan distribusi peran), fungsi mediasi (meliputi akses, fasilitasi, dan keadilan), serta dimensi keberlanjutan usaha (ekonomi, sosial, dan lingkungan). Pendekatan ini memungkinkan formulasi hipotesis untuk menguji peran mediasi sebagai variabel intervening, sebagaimana dijelaskan dalam model Baron dan Kenny (1986). Untuk mengukur keberlanjutan secara komprehensif, digunakan kerangka *triple bottom line* yang mencakup indikator efisiensi, profitabilitas, kesejahteraan sosial, dan pengelolaan lingkungan.

Untuk memperkuat integrasi antara kerangka teoritis dan pelaksanaan di lapangan, penelitian ini juga mengadopsi *Collaborative Action Theory*, yang menekankan pentingnya proses dialog, negosiasi, dan refleksi bersama antaraktor untuk membentuk aksi kolektif yang bermakna (Ansell & Gash, 2008). Dalam konteks kemitraan peternakan ayam petelur, model kemitraan bermediasi menuntut terciptanya ruang deliberatif dan mekanisme koordinasi lintas aktor, seperti peternak, perusahaan mitra, pemerintah daerah, dan lembaga mediasi. Teori ini menjadi relevan untuk memahami bagaimana relasi antarpelaku dapat bertransformasi dari sekadar transaksi menjadi kerja sama yang kolaboratif dan berorientasi pada keberlanjutan, dengan dukungan fasilitator netral.

Selanjutnya, pendekatan *Agricultural Innovation System* (AIS) memberikan kerangka analisis tambahan untuk menjelaskan bahwa keberhasilan intervensi dalam sektor peternakan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kapasitas kolektif para aktor untuk belajar, berinovasi, dan berbagi pengetahuan (Hall, 2005). Dalam kerangka ini, peran mediator tidak terbatas sebagai penghubung administratif, melainkan sebagai penggerak inovasi kelembagaan (*institutional innovation*) yang mendorong terciptanya model kemitraan yang adaptif dan inklusif. Fungsi ini mencakup pelatihan teknis, penguatan kapasitas kelembagaan peternak, fasilitasi kebijakan lokal, dan pengembangan sistem informasi agribisnis.

Akhirnya, teori *modal sosial* (social capital) yang dikembangkan oleh Putnam *et al.* (1993) memberikan landasan untuk memahami pentingnya jaringan kepercayaan, norma bersama, dan partisipasi kolektif dalam membangun kapasitas kelembagaan lokal. Dalam konteks peternakan rakyat, tingginya modal sosial antarpeternak dapat dimanfaatkan sebagai fondasi pembentukan koperasi atau asosiasi yang mampu menjadi mitra strategis dalam sistem kemitraan. Mediator dalam penelitian ini berperan untuk mengidentifikasi, menguatkan, dan mengaktivasi modal sosial tersebut sebagai sumber legitimasi dan efektivitas dalam pelaksanaan mediasi.

2.3 Teori yang Diaplikasikan dalam Analisis Penelitian

Dalam tahap analisis, penelitian ini mengadopsi pendekatan analisis mediasi menggunakan regresi linear sebagaimana diformulasikan oleh Baron dan Kenny (1986). Model ini memungkinkan identifikasi hubungan kausal langsung maupun tidak langsung antara variabel independen (struktur kemitraan), variabel mediasi (efisiensi usaha dan akses terhadap input serta pasar), dan variabel dependen (keberlanjutan usaha peternakan). Pendekatan partial mediation digunakan untuk mengukur proporsi kontribusi jalur mediasi terhadap efek total model kemitraan terhadap keberlanjutan, sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran mediator dalam sistem kemitraan.

Keberlanjutan usaha dievaluasi dengan mengacu pada pendekatan *Triple Bottom Line* (TBL) yang mencakup dimensi ekonomi (profitabilitas), sosial (kepuasan

kerja dan relasi antar aktor), serta lingkungan (praktik manajemen limbah). Variabel mediasi diukur melalui indikator kuantitatif seperti akses terhadap input produksi, dukungan pasar, dan efisiensi biaya operasional, yang keseluruhannya mencerminkan kapabilitas kelembagaan peternak dalam ekosistem kemitraan.

Untuk memperkuat dasar teoretis analisis kuantitatif ini, digunakan kerangka *Resource Orchestration Theory*. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan organisasi kecil tidak hanya bergantung pada kepemilikan sumber daya, tetapi juga pada kemampuan mengelola, mengatur, dan memobilisasi sumber daya secara efektif melalui proses strukturisasi, *bundling*, dan *leveraging* (Sirmon *et al.*, 2007). Dalam konteks kemitraan bermediasi, mediator memainkan peran strategis sebagai fasilitator yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya eksternal baik finansial, teknologi, maupun sosial untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha peternak kecil yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya secara mandiri.

2.4 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Kemitraan dalam usaha agribisnis telah berkembang sebagai inovasi kelembagaan strategis yang mampu mengintegrasikan berbagai aktor dalam rantai nilai, mulai dari tahap produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran. Integrasi ini tidak hanya menciptakan nilai tambah pada produk, tetapi juga meningkatkan daya saing usaha secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaan mekanisme kemitraan tersebut, peran mediator seperti koperasi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun institusi publik menjadi sangat penting. Mediator berperan memfasilitasi keterhubungan dan koordinasi antar pelaku, mengurangi ketimpangan dalam kekuatan tawar-menawar, serta menyediakan jaminan pasar, pelatihan teknis, dan stabilitas harga. Keberhasilan implementasi kemitraan bergantung pada sejumlah faktor, seperti kejelasan kontrak tertulis, pengelolaan produksi yang adaptif terhadap dinamika pasar, komunikasi terbuka, pembagian hak dan kewajiban yang adil, serta kemampuan membangun kepercayaan antar pihak. Oleh karena itu, pendekatan kemitraan berbasis kolaborasi dan fasilitasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok serta mendukung kesejahteraan kelompok usaha agribisnis kecil dan menengah.

Berbagai studi menunjukkan bahwa sistem kemitraan yang didukung oleh institusi mediasi pihak ketiga terbukti menjadi instrumen strategis dalam mendorong produktivitas, daya saing, dan keberlanjutan peternakan skala kecil. Keberhasilan sistem koperasi yang sekaligus berperan sebagai mediator terlihat nyata di Selandia Baru. Koperasi susu di negara tersebut tidak hanya mengelola produksi dan pemasaran secara kolektif, tetapi juga berperan sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan peternak anggota dengan pasar global. Fungsi koperasi mencakup penyediaan layanan teknis, pelatihan, teknologi, serta fasilitasi dalam proses negosiasi dan pemenuhan standar mutu kolektif. Hal ini mencerminkan bentuk nyata dari kemitraan bermediasi, di mana koperasi bertindak sebagai aktor ketiga yang menghubungkan peternak dengan pembeli atau pengolah susu (Evans & Meade, 2006).

Peran serupa juga ditemukan di Kenya, di mana koperasi pertanian memainkan peran penting dalam memediasi akses sumber daya dan peningkatan kapasitas peternak sapi perah skala kecil. Wambu dan Gichuki (2023) mencatat bahwa koperasi berfungsi sebagai fasilitator dalam penyediaan pakan, pengelolaan hijauan, serta pelatihan teknis untuk mendukung produktivitas dan ketahanan usaha peternak. Selain itu, Githinji (2021) melaporkan keberhasilan koperasi dalam memfasilitasi program vaksinasi massal bagi peternak sapi, yang turut meningkatkan kesehatan hewan dan keberlanjutan produksi.

Eaton dan Shepherd (2001) dalam bukunya *Contract Farming: Partnerships for Growth* menegaskan bahwa keberhasilan model kemitraan kontraktual sangat dipengaruhi oleh dukungan teknis dan administratif dari pihak ketiga yang netral. Lembaga seperti LSM atau organisasi pendukung berperan dalam memediasi hubungan antara peternak kecil dan perusahaan inti, melalui pelatihan intensif, pembinaan teknis, serta fasilitasi dalam pengelolaan usaha. Dukungan ini bertujuan meningkatkan produktivitas dan memperkuat keberlanjutan usaha peternak kecil.

Pengalaman keberhasilan contract farming juga dilaporkan di Lebanon pada sektor peternakan ayam broiler. Kozhaya (2020) mencatat bahwa partisipasi peternak dalam kontrak menghasilkan manfaat ekonomi, termasuk peningkatan pendapatan,

bantuan teknis, dan pengurangan risiko harga. Meski demikian, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan pemahaman terhadap isi kontrak, keterlambatan pembayaran, serta hubungan kemitraan yang tidak selalu setara. Studi ini membandingkan peternak yang mengikuti kontrak dan yang tidak, dengan menilai perbedaan dalam pendapatan, biaya produksi, risiko, dan akses terhadap teknologi.

Keberhasilan kelembagaan agribisnis juga tercermin dari praktik pada sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Studi oleh Hellin *et al.* (2009) menegaskan bahwa organisasi petani dan aksi kolektif berperan penting dalam memperkuat posisi tawar petani kecil di tengah struktur pasar yang kompleks akibat globalisasi. Melalui pengembangan produk bernilai tambah dan model bisnis yang adaptif, organisasi petani mampu meningkatkan akses pasar di wilayah Meso-Amerika, khususnya Honduras dan El Salvador. Keberhasilan tersebut sangat bergantung pada kapabilitas internal organisasi, dukungan eksternal dari sektor publik maupun swasta, serta kemampuan beradaptasi terhadap konteks lokal.

Barrett *et al.* (2012) menunjukkan bahwa efektivitas kemitraan kontraktual dalam meningkatkan pendapatan petani kecil di negara berkembang sangat bergantung pada akses yang adil terhadap informasi, input produksi, dan perlindungan risiko. Sebaliknya, Narayanan (2014) memperingatkan bahwa skema kemitraan yang bersifat dominatif tanpa peran mediasi justru memperbesar ketimpangan manfaat antara pihak mitra dan peternak kecil.

2.5 Kerangka Pemikiran

Peternakan ayam petelur skala kecil di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan struktural yang berdampak langsung pada rendahnya produktivitas dan efisiensi usaha peternak rakyat. Keterbatasan modal, akses terhadap teknologi modern, serta lemahnya manajemen dan jaringan pemasaran menjadi permasalahan utama yang umum dihadapi. Peternak kecil sering mengalami kesulitan dalam memperoleh modal untuk investasi peralatan dan infrastruktur kandang, sehingga skala usaha sulit berkembang. Selain itu, keterbatasan pengetahuan dan akses terhadap teknologi modern menyebabkan sebagian besar peternak masih menerapkan metode tradisional yang kurang efisien, sementara akses pasar yang

terbatas membuat posisi tawar peternak relatif lemah. Kondisi tersebut diperparah oleh praktik manajemen usaha yang belum optimal, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya produktivitas dan kualitas produksi telur.

Produktivitas dan efisiensi peternakan ayam petelur sangat dipengaruhi oleh manajemen pemeliharaan dan kualitas lingkungan. Produktivitas ayam petelur umumnya diukur dari jumlah produksi telur dalam periode tertentu, di mana ayam petelur berumur 18–90 minggu memiliki potensi produksi sekitar 420 butir atau lebih dari 90% tingkat produksi (Milenia *et al.*, 2022; Anonim, 2020). Namun, banyak peternak skala kecil belum mampu mencapai potensi tersebut akibat keterbatasan akses terhadap pakan berkualitas, teknologi, serta manajemen yang baik. Faktor-faktor penentu produktivitas meliputi nutrisi, genetik, manajemen pemeliharaan, kualitas lingkungan, modal dan akses sumber daya, serta ketersediaan tenaga kerja terampil. Nutrisi yang memadai merupakan prasyarat utama untuk mendukung produksi telur yang optimal, sementara pemilihan strain ayam petelur unggul memerlukan dukungan manajemen yang tepat agar performa genetik dapat tercapai secara maksimal.

Aspek manajemen kandang, khususnya pengaturan suhu, pencahayaan, dan sirkulasi udara, juga sangat menentukan kesehatan dan produktivitas ayam. Ayam petelur memerlukan pencahayaan selama 14–16 jam per hari untuk merangsang produksi telur (Yulianto *et al.*, 2023). Selain itu, kualitas lingkungan kandang yang baik, termasuk kebersihan udara dan sanitasi kandang, berperan penting dalam menekan tingkat stres dan penyakit pada ayam. Sirkulasi udara yang buruk dapat meningkatkan stres ternak dan menurunkan produksi telur (Yulianto *et al.*, 2023). Namun demikian, perbaikan infrastruktur kandang dan pemenuhan pakan serta obat-obatan berkualitas sering kali terhambat oleh keterbatasan modal peternak kecil. Keterbatasan tenaga kerja terampil dan kemampuan manajerial juga menyebabkan efisiensi operasional sulit dicapai secara optimal.

Dalam konteks tersebut, model kemitraan bermediasi dipandang sebagai salah satu solusi strategis untuk mengatasi hambatan akses modal, teknologi, dan pasar yang dihadapi peternak ayam petelur skala kecil. Model ini melibatkan pihak ketiga

sebagai mediator yang berfungsi menjembatani kepentingan peternak dan perusahaan mitra agar kerja sama dapat berjalan secara adil dan saling menguntungkan. Pengembangan model kemitraan bermediasi mencakup beberapa komponen utama, antara lain struktur kemitraan yang jelas, perjanjian kerja sama tertulis, bimbingan dan pelatihan teknis, jaminan akses pasar, serta penyediaan akses pembiayaan. Perjanjian kerja sama menjadi elemen krusial karena memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga memberikan kepastian hukum dan meminimalkan potensi konflik di kemudian hari.

Melalui model kemitraan bermediasi, peternak dapat memperoleh akses modal dalam bentuk pinjaman atau bantuan pembiayaan dari perusahaan mitra dengan skema yang lebih fleksibel, tanpa adanya intervensi pasar yang merugikan. Perusahaan mitra juga dapat menyediakan sarana produksi seperti DOC, pakan, dan obat-obatan dengan sistem pembayaran yang disesuaikan dengan kemampuan peternak. Selain itu, mediator dan perusahaan berperan dalam memberikan pelatihan dan bimbingan teknis yang mencakup manajemen budidaya, kesehatan ternak, serta strategi pemasaran yang efektif. Jaminan pasar menjadi salah satu keunggulan utama model ini, karena perusahaan mitra memiliki jaringan distribusi yang lebih luas sehingga mampu menyerap hasil produksi peternak dengan harga yang lebih stabil dan kompetitif. Dengan adanya kepastian pasar, peternak memiliki rasa aman untuk berinvestasi dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

Pengembangan model kemitraan bermediasi perlu diintegrasikan secara menyeluruh dengan sistem agribisnis ayam petelur. Tahapan pengembangannya meliputi identifikasi mitra potensial, penyusunan perjanjian kerja sama, pengembangan rencana usaha bersama, transfer pengetahuan dan teknologi, penguatan kapasitas manajemen peternak, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala. Dalam hal ini, peran mediator menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh tahapan kemitraan berjalan sesuai kesepakatan dan memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pihak. Mediator juga berfungsi sebagai pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program kemitraan, sekaligus memfasilitasi penyelesaian konflik apabila terjadi perbedaan kepentingan.

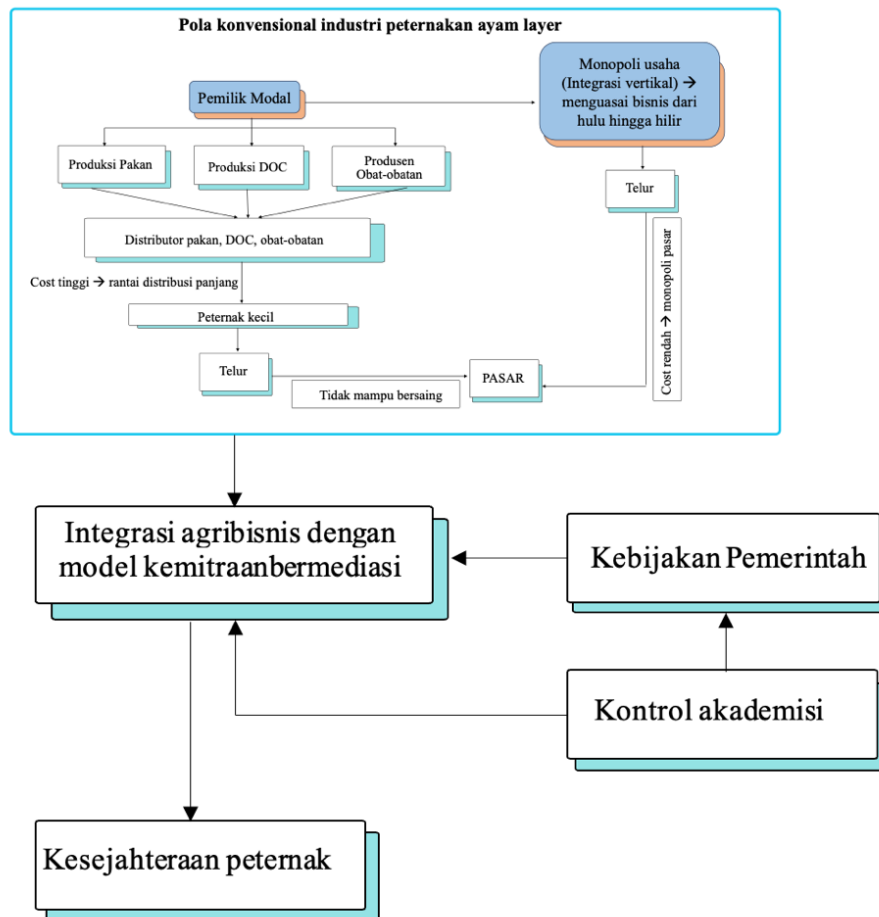
Integrasi agribisnis melalui model kemitraan bermediasi diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan produktivitas, efisiensi, dan kesejahteraan ekonomi peternak ayam petelur skala kecil. Namun demikian, implementasi model ini juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti perbedaan budaya dan praktik usaha antara peternak kecil dan perusahaan besar, serta kompleksitas manajemen dalam mengintegrasikan berbagai komponen usaha. Oleh karena itu, peran mediator menjadi kunci dalam menjembatani perbedaan tersebut dan menjaga keberlanjutan kemitraan. Apabila tantangan-tantangan tersebut dapat dikelola dengan baik, model kemitraan bermediasi berpotensi menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kinerja peternakan ayam petelur skala kecil di Indonesia.

Keberhasilan implementasi model kemitraan bermediasi juga sangat dipengaruhi oleh dukungan kebijakan dan regulasi pemerintah. Pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan regulasi yang efisien, responsif, dan berorientasi pada pemberdayaan peternak kecil. Kebijakan yang mendukung penyederhanaan proses perizinan, peningkatan akses pembiayaan, serta penyediaan teknologi dan pelatihan manajemen sangat penting agar program kemitraan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Kebijakan kredit dan pembiayaan pertanian yang dirancang secara strategis terbukti mampu meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha kecil serta memperluas dukungan modal bagi peternak (Ashari, 2009).

Sebaliknya, proses administrasi yang panjang dan kompleks dalam mengakses dana dan teknologi sering menjadi hambatan utama dalam implementasi kemitraan agribisnis. Ketidakpastian aturan dan prosedur yang berbelit dapat menyulitkan peternak kecil dalam memperoleh bantuan modal maupun teknologi yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, penyederhanaan prosedur administratif serta perluasan layanan dukungan pemerintah, seperti penyuluhan teknologi pertanian modern, menjadi faktor penting dalam mendorong partisipasi peternak kecil dalam kemitraan yang efektif (Sudarwati & Nasution, 2024).

Selain aspek regulasi, koordinasi antar lembaga pemerintah juga sangat menentukan keberhasilan implementasi model kemitraan bermediasi. Fragmentasi kebijakan dan lemahnya sinergi antar instansi berpotensi menimbulkan tumpang tindih program, inefisiensi sumber daya, serta rendahnya efektivitas kebijakan di tingkat lapangan. Penelitian menunjukkan bahwa fragmentasi kebijakan pertanian di Indonesia masih menjadi tantangan akibat keterbatasan integrasi lintas sektor dan kurangnya koordinasi strategis dalam perumusan serta implementasi kebijakan pembangunan pertanian dan pedesaan (Wulandari & Zakaria, 2025). Oleh karena itu, penguatan mekanisme kolaborasi antar lembaga, termasuk pembentukan forum lintas sektor untuk evaluasi kebijakan secara berkala, menjadi langkah penting dalam mendukung keberlanjutan kemitraan agribisnis (Pasaribu, 2025).

Secara keseluruhan, pengembangan model kemitraan bermediasi merupakan strategi penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing, khususnya dalam menghadapi tantangan persaingan global di sektor peternakan unggas. Model ini berfungsi sebagai bentuk integrasi horizontal yang mengedepankan prinsip kesetaraan antara pelaku usaha kecil-menengah yang tergabung dalam koperasi, pemilik modal, pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, serta perguruan tinggi sebagai penyedia dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sinergi yang kuat, saling percaya, dan berlandaskan integritas di antara keempat unsur tersebut menjadi fondasi utama untuk memperkuat posisi peternak kecil agar mampu menjalankan usaha peternakan ayam petelur secara berkelanjutan. Kerangka pemikiran dari penelitian ini disajikan secara ringkas pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Diagram alir kerangka pemikiran.

2.6 Tinjauan Literatur dan Landasan Teoritis

2.6.1 Konsep Organisasi dan Kelembagaan

Organisasi memiliki berbagai macam definisi sesuai dengan kepentingan dan tujuan penelitian. Definisi organisasi juga bergantung pada konteks dan perspektif keilmuan dari seseorang yang merumuskan definisi tersebut. Salah satu definisi organisasi adalah suatu kesatuan sosial dari sekelompok orang yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu dan setiap anggota organisasi memiliki tugas dan fungsi tertentu. Organisasi sebagai suatu kesatuan memiliki tujuan tertentu dan memiliki batas-batas yang jelas, sehingga dapat dipisahkan (Rernawan, 2011).

Kelembagaan dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan sosial yang melakukan usaha untuk mencapai tujuan tertentu, dengan menfokuskan pada perilaku dengan nilai, norma dan aturan yang mengikutinya, serta memiliki bentuk dan area aktivitas tempat berlangsungnya. Kelembagaan juga dapat berperan sebagai aturan main yang membatasi aktivitas anggota dalam mencapai tujuan organisasi. Kelembagaan juga dapat berperan sebagai organisasi yang menggambarkan aktivitas ekonomi yang didominasi oleh mekanisme administrasi dan komando.

Kelembagaan peternakan berperan penting dalam proses usaha ternak, yaitu sebagai wadah organisasi peternak yang mampu berorientasi pada agribisnis peternakan dari hulu hingga hilir, serta membangun jejaring dengan pemangku kepentingan (stakeholder) (Amam & Rusdiana, 2022). Dibentuknya kelembagaan seperti kelompok tani/peternak atau koperasi secara ekonomi merupakan suatu upaya untuk menghindari biaya transaksi yang tinggi yang harus dikeluarkan oleh peternak. Inovasi kelembagaan dapat mengurangi biaya transaksi seperti biaya informasi, negosiasi, pengukuran dan pertukaran). Inovasi kelembagaan juga dapat meningkatkan koordinasi pasar misalnya kelompok pemasaran atau tindakan kolektif.

Kelembagaan peternakan erat kaitannya dengan sebuah proses pemberdayaan peternak. PP No. 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak ayat 1 menyebutkan kelembagaan peternak merupakan segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten dan pemangku kepentingan di bidang peternakan dan kesehatan hewan untuk meningkatkan kemandirian, memberikan kemudahan dan kemajuan usaha, serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan peternak.

Selain itu, dalam PP tersebut diatur tentang hal-hal yang dapat memberikan kemudahan bagi peternak yaitu:

- a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
- b. pelayanan Peternakan, pelayanan Kesehatan Hewan dan bantuan teknik;
- c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;

- d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antarpelaku usaha;
- e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau me peningkatan kewirausahaan;
- f. pengutamakan pemanfaatan sumber daya Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam negeri;
- g. pemfasilitasan terbentuknya kawasan pengembangan Usaha Peternakan;
- h. pemfasilitasan pelaksanaan promosi dan pemasaran; dan/atau
- i. perlindungan harga dan Produk Hewan dari luar negeri.

Merujuk Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 13 Tahun 2017, kelembagaan peternakan dapat berfungsi sebagai mitra peternak. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa kemitraan usaha peternakan merupakan kerjasama antar usaha peternakan atas dasar prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab dan ketergantungan (Gambar 3). Berdasarkan aturan tersebut, ditetapkan keputusan tentang pembinaan dan pengawasan kemitraan usaha peternakan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Tujuan dari dibentuknya kemitraan usaha peternakan adalah untuk menggiatkan usaha peternakan rakyat (Yaqin *et al.*, 2021).



Gambar 3. Esensi kelembagaan sistem kemitraan bermediasi.

Kelembagaan dibentuk oleh petani atau peternak untuk memperkuat dan memperjuangkan kepentingan mereka. Kelembagaan ini dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya (Rifa'i *et al.*, 2021). Dengan dibentuknya kelembagaan, peternak akan lebih mudah dalam mengakses bahan baku (*input*) dan juga mengoptimalkan pemasaran hasil (*output*).

Kelembagaan berpotensi mengurangi dampak pasar tidak sempurna, memungkinkan kordinasi hubungan input dan output, serta memanfaatkan fungsi pasar untuk petani kecil (Amam & Rusidana, 2022). Pemasaran produk pertanian dan peternakan cenderung tidak sempurna. Banyak petani dan peternak berhadapan dengan berbagai perusahaan yang menggambarkan ciri pasar monopsoni. Selain itu, mobilitas petani maupun peternak dalam mengakses pabrik sangat terbatas yang dipengaruhi beberapa faktor, misalnya jarak yang sulit dijangkau.

2.6.2 Konsep Kerjasama Kemitraan

Dalam konteks agribisnis ayam petelur, kemitraan merujuk pada suatu kerjasama antara berbagai pihak, seperti peternak, pemasok pakan, layanan kesehatan hewan dan saluran pemasaran, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan keuntungan dalam produksi telur. Konsep dasar kemitraan adalah menjalin kerjasama dalam suatu usaha antara dua pihak atau lebih. Pihak-pihak yang bekerjasama memiliki kedudukan sejajar. Dalam kemitraan, semua prinsip dasar harus terpenuhi yaitu saling membutuhkan, melengkapi dan menguntungkan, serta saling memperkuat. Kemitraan tidak dapat terjadi secara mendadak, melainkan melalui proses evolusi dari usaha pihak-pihak yang bermitra dan memiliki komitmen yang sama (Azhari, 2000).

Kemitraan ini sering kali melibatkan kesepakatan di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi berupa keahlian, sumber daya, atau layanan untuk mencapai manfaat bersama. Misalnya, peternak bisa bermitra dengan perusahaan pakan untuk memastikan pasokan pakan berkualitas tinggi secara konsisten, atau dengan layanan kesehatan hewan untuk menjaga kesehatan ternak. Selain itu,

kemitraan juga bisa melibatkan aspek pemasaran dan distribusi, di mana peternak bekerja sama dengan pengecer atau distributor untuk memastikan telur mereka sampai ke konsumen dengan efisien.

Kemitraan ini bisa bersifat formal, dengan adanya kontrak yang menjelaskan tanggung jawab dan harapan dari masing-masing pihak, atau informal, yang didasarkan pada kepercayaan dan hubungan jangka panjang. Tujuan dari kemitraan ini adalah menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, di mana semua pihak yang terlibat mendapatkan manfaat dari proses produksi yang lebih baik, biaya yang lebih rendah, risiko yang dibagi dan akses pasar yang lebih luas (Saragih, 2001).

2.6.3 Peran Mediator dalam Kemitraan

Kemitraan bermediasi dalam agribisnis peternakan adalah bentuk kemitraan yang di dalamnya terdapat pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator atau perantara antara dua pihak utama. Dalam hal peternakan pihak pertama merupakan peternak dan pihak kedua merupakan perusahaan agribisnis. Peran mediator ini dapat dipegang oleh pemerintah, Lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, maupun organisasi non-pemerintah (NGO). Tujuan adanya mediator adalah untuk memastikan bahwa kemitraan berjalan dengan adil, efektif dan saling menguntungkan (Saragih, 2001). Mediator membantu dalam negosiasi kontrak, penyelesaian sengketa dan pemantauan implementasi kesepakatan. Pihak pertama dan ke dua bertanggung jawab atas pemenuhan komitmen yang telah disepakati (Maryudi & Nurrochmat, 2007).

Mediator adalah pihak ketiga yang tidak berkepentingan langsung dalam operasional agribisnis. Mediator memiliki peran penting dalam memfasilitasi, mengarahkan dan mengawasi hubungan antara kedua pihak yaitu pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama adalah peternak atau kelompok peternak yang terlibat dalam produksi, yang biasanya membutuhkan dukungan teknologi, modal, atau akses ke pasar. Pihak ke dua adalah perusahaan agribisnis yang membutuhkan pasokan produk (misalnya, telur atau ayam hidup) dari peternak. Perusahaan sering

kali menawarkan kontrak jangka panjang, teknologi dan bantuan finansial (Sumardjo, 2009).

2.6.4 Korporasi Peternakan Rakyat

Korporasi Peternakan Rakyat adalah model usaha kolektif yang melibatkan peternak skala kecil dalam satu kesatuan atau korporasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi produksi peternakan rakyat dengan menggabungkan sumber daya, seperti modal, teknologi dan akses pasar, yang mungkin sulit dijangkau oleh peternak secara individu (Menteri Pertanian Republik Indonesia, 2020; Suryana, 2017). Dalam korporasi peternakan rakyat terdapat enam karakteristik utama yaitu:

1. Kolektivitas di mana peternak skala kecil bergabung dalam suatu organisasi atau badan usaha bersama.
2. Pengelolaan terpusat yaitu korporasi dikelola secara terpusat dengan sistem yang profesional dengan tujuan untuk efisiensi operasional.
3. Skala ekonomi yaitu dengan menggabungkan beberapa peternak dalam satu kesatuan sehingga korporasi mampu mencapai skala ekonomi yang lebih besar. Dengan demikian memungkinkan untuk dapat bersaing dengan perusahaan besar dalam hal harga dan kualitas produk.
4. Akses pasar yaitu korporasi peternakan rakyat memfasilitasi akses pasar yang lebih baik bagi anggotanya. Ini termasuk pengadaan kontrak dengan perusahaan besar, akses ke pasar ekspor, serta mendapatkan harga yang lebih stabil dan menguntungkan.
5. Peningkatan kesejahteraan peternak dimana dengan skala usaha yang lebih besar dan manajemen yang profesional, korporasi ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak kecil.
6. Dukungan pemerintah baik berupa regulasi, subsidi, maupun bantuan teknis (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2019).

Korporasi peternakan rakyat memiliki struktur organisasi yang dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan peternak kecil dengan memaksimalkan efisiensi operasional dan daya saing di pasar. Struktur model ini menggabungkan prinsip-

prinsip pengelolaan profesional dengan partisipasi aktif dari anggotanya, yaitu peternak kecil. struktur organisasi dalam korporasi peternakan rakyat terdiri dari:

1. Pengurus yang bertanggung jawab dalam mengelola operasional serta memastikan kepatuhan anggota terhadap peraturan. Selain itu pengurus juga memiliki kewajiban dalam membuat laporan.
2. Dewan pengawas yang berfungsi mengawasi kinerja pengurus sehingga korporasi dapat berjalan sesuai dengan visi misi yang disepakati.
3. Anggota adalah peternak yang menjadi bagian dalam korporasi. Peternak berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan yang disediakan korporasi. Peternak juga memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan strategis

Dalam menjalankan korporasi, tentunya harus ada tutunan dalam manajemen operasional. Operasional usaha dibagi menjadi unit produksi, unit pemasaran, unit keuangan dan akuntansi, serta unit pelatihan dan pengembangan. Unit produksi bertanggung jawab untuk mengelola produksi ternak secara kolektif. Unit ini mengkoordinasikan penggunaan pakan, pengelolaan kesehatan hewan dan proses produksi lainnya untuk memastikan efisiensi dan kualitas produk. Unit pemasaran berfungsi untuk memasarkan produk ternak ke pasar yang lebih luas, baik di tingkat lokal maupun nasional. Unit pemasaran juga menjalin kerja sama dengan mitra bisnis, seperti pengepul, distributor dan industri pengolahan. Unit keuangan dan akuntansi menangani aspek keuangan, termasuk pencatatan akuntansi, manajemen kas dan pembagian keuntungan kepada anggota. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sangat penting untuk menjaga kepercayaan anggota. Unit pelatihan dan pengembangan bertanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan peternak melalui pelatihan, pendampingan teknis dan pengembangan teknologi. Unit ini bekerja sama dengan lembaga pendidikan, pemerintah dan LSM untuk memberikan pelatihan yang relevan (Saragih, 2011).

2.6.5 Optimalisasi Sumber Daya

Berdasarkan pada data Kementerian Pertanian Republik Indonesia (2020) optimalisasi sumber daya dalam peternakan ayam petelur melibatkan penggunaan sumber daya yang ada (seperti lahan, tenaga kerja, modal dan input produksi

lainnya) secara efektif untuk memaksimalkan output. Strategi optimalisasi meliputi:

1. Rotasi dan pergantian pakan yaitu menggunakan formulasi pakan yang tepat untuk setiap tahap perkembangan ayam agar mendapatkan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
2. Penggunaan tenaga kerja yang efisien dengan mengatur jadwal dan tugas tenaga kerja secara efektif untuk mengurangi waktu yang terbuang dan meningkatkan produktivitas.
3. Investasi dalam teknologi dengan menggunakan teknologi yang dapat membantu dalam pemantauan kesehatan ayam, manajemen pakan dan pengelolaan lingkungan kandang (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2020).

2.6.6 Analisis Biaya Manfaat

Analisis biaya manfaat merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja ekonomi usaha peternakan ayam petelur skala kecil, sekaligus menilai implikasi ekonomi dari penerapan model kemitraan bermediasi terhadap kinerja usaha peternak. Analisis ini difokuskan pada kemampuan usaha dalam menghasilkan keuntungan, efisiensi penggunaan modal, tingkat risiko finansial, serta dinamika pertumbuhan usaha dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat statis, tetapi juga mempertimbangkan perubahan kinerja ekonomi peternak sebelum dan sesudah penerapan kemitraan bermediasi.

Metode utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis biaya dan manfaat (cost-benefit analysis), yaitu dengan membandingkan seluruh biaya produksi yang dikeluarkan dengan manfaat ekonomi yang diperoleh selama satu siklus usaha peternakan ayam petelur. Analisis biaya-manfaat merupakan pendekatan yang umum digunakan dalam evaluasi kelayakan ekonomi usaha peternakan dan agribisnis karena mampu menggambarkan efisiensi pemanfaatan sumber daya, tingkat keuntungan usaha, serta kelayakan finansial secara menyeluruh (Gittinger, 1982; Saragih, 2011). Dalam konteks penelitian ini,

pendekatan tersebut digunakan untuk menilai kinerja ekonomi usaha peternakan ayam petelur skala kecil yang terlibat dalam sistem kemitraan bermediasi.

Tahapan pengukuran kinerja ekonomi usaha meliputi identifikasi dan perhitungan biaya produksi, yang terdiri atas biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel mencakup pakan, bibit ayam, obat dan vitamin, tenaga kerja, serta biaya operasional lainnya yang berubah seiring dengan volume produksi. Sementara itu, biaya tetap meliputi biaya penyusutan kandang dan peralatan, serta biaya manajerial yang relatif konstan dalam jangka pendek (Warsito, 2010; Saragih, 2011).

Manfaat ekonomi usaha diukur melalui total pendapatan yang diperoleh peternak, yang bersumber dari penjualan telur sebagai produk utama, serta pendapatan tambahan dari penjualan ayam afkir, kotoran ayam, dan produk sampingan lainnya. Pendekatan ini sejalan dengan karakteristik usaha peternakan ayam petelur skala kecil yang umumnya mengandalkan diversifikasi pendapatan untuk menjaga stabilitas arus kas dan mengurangi risiko usaha (Ceufin *et al.*, 2020).

Kinerja ekonomi usaha kemudian dianalisis menggunakan beberapa indikator utama, yaitu laba bersih, Return on Investment (ROI), Break Even Point (BEP), rasio manfaat-biaya (Benefit–Cost Ratio/B/C Ratio), serta tingkat pertumbuhan usaha. Laba bersih dihitung sebagai selisih antara total pendapatan dan total biaya produksi, yang mencerminkan kemampuan usaha dalam menghasilkan keuntungan bersih (Gittinger, 1982). ROI digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal dan daya tarik ekonomi usaha dibandingkan alternatif investasi lainnya (Hernanto, 1996). BEP digunakan untuk menilai tingkat risiko usaha dengan menunjukkan batas minimal produksi atau nilai penjualan agar usaha tidak mengalami kerugian (Warsito, 2010). Sementara itu, B/C Ratio digunakan sebagai indikator kelayakan ekonomi usaha, di mana nilai B/C lebih besar dari satu menunjukkan bahwa usaha layak dan menguntungkan untuk dijalankan (Saragih, 2011; Ceufin *et al.*, 2020).

Selain indikator statis, penelitian ini juga mengukur pertumbuhan usaha untuk menangkap dinamika kinerja ekonomi dari waktu ke waktu. Pertumbuhan usaha diukur berdasarkan perubahan laba bersih antarperiode, yang mencerminkan

kemampuan usaha untuk berkembang dan beradaptasi terhadap perubahan kondisi pasar serta penerapan sistem kemitraan bermediasi (Rastana *et al.*, 2020). Analisis pertumbuhan ini penting untuk menilai keberlanjutan ekonomi usaha peternakan ayam petelur dalam jangka menengah dan panjang.

2.6.7 Input Usaha Ternak

Sistem agribisnis peternakan merupakan gabungan kegiatan antar subsistem yang saling terkait dan mendukung sehingga membentuk suatu totalitas. Subsistem agribisnis hulu merupakan kegiatan pengadaan atau penyaluran sarana produksi ternak. Prinsip dasar dalam subsistem ini mencakup perencanaan dan pengelolaan sarana produksi ternak, teknologi dan sumber daya. Subsistem usaha tani ternak merupakan proses produksi yang mencakup kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha ternak dengan tujuan peningkatan produksi ternak. Dalam subsistem ini mencakup pemilihan lokasi ternak, penentuan komoditas, teknologi yang diterapkan dan pola yang ideal.

Input usaha tani ternak merupakan semua faktor produksi yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk peternakan. Beberapa input dalam sistem usaha tani ternak adalah bibit, pakan, obat-obatan, tenaga kerja dan lain-lain. Untuk mencapai produksi ternak yang optimal, perlu mempertimbangkan input yang baik termasuk bibit dan pakan ternak. Pemilihan bibit ternak menjadi kunci utama produksi yang optimal. Bibit yang digunakan harus merupakan bibit unggul dan jelas asal usulnya. Pakan yang sesuai juga sangat menunjang keberhasilan produksi. Mutu pakan dan interval waktu pemberian pakan merupakan hal yang perlu diperhatikan.

2.6.8 Proses Produksi, Pengolahan, Distribusi dan Pemasaran Ayam Petelur

Salah satu komoditas pangan hewani yang banyak dikonsumsi masyarakat adalah telur ayam. Kandungan gizi pada sebutir telur ayam cukup lengkap dan harga telur cukup terjangkau sehingga telur menjadi pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Peternakan ayam petelur menjadi sektor usaha yang menyerap banyak tenaga kerja dan berkontribusi dalam menghasilkan produk domestik bruto. Di Indonesia, peternakan ayam petelur didominasi oleh peternak skala kecil sebagai penggerak ekonomi bagi masyarakat pedesaan (Yulianto *et al.*, 2023).

Ayam petelur adalah ayam yang mampu menghasilkan telur dengan produksi yang tinggi dan tidak memiliki sifat mengeram, ayam ini merupakan hasil rekayasa genetik (Rasyaf, 2002). Ayam ras petelur merupakan hasil silangan berbagai bangsa ayam (Nurcholis *et al.*, 2009).

Ayam petelur secara khusus dikembangkan untuk memproduksi telur secara komersial. Ayam petelur sangat efisien dalam menghasilkan telur, yang dimulai sejak umur 5 bulan pemeliharaan dengan jumlah telur 250-300 butir per ekor per tahun (Susilorini *et al.*, 2009). Namun produktivitas ayam petelur sangat bergantung pada nutrisi pakan yang diberikan (Asnawi *et al.*, 2017), kualitas bibit yang digunakan dan perawatan. Ifeduba *et al.* (2020) juga menyatakan bahwa produksi ayam petelur dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya bibit, umur, kondisi kesehatan ayam, perkandangan pencahayaan, pakan dan suhu lingkungan. Terdapat dua kelompok ayam petelur yang dibudidayakan saat ini yaitu ayam petelur tipe medium dan ayam petelur tipe ringan. Ayam petelur tipe medium menghasilkan telur dengan kerabang berwarna cokelat. Ayam petelur tipe ringan menghasilkan telur dengan kerabang warna putih (North & Bell, 1990). Ayam petelur tipe medium disebut juga ayam dwiguna yaitu selain sebagai ayam petelur dapat dimanfaatkan juga sebagai ayam pedaging ketika memasuki masa afkir. Umumnya ayam petelur tipe medium berwarna cokelat (Rasyaf, 2002). Badan ayam petelur tipe medium lebih kokoh dibandingkan dengan ayam petelur tipe ringan, perilaku ayam petelur tipe medium juga lebih tenang. Kandungan lemak dan daging pada ayam tipe medium juga lebih tinggi sehingga berat tubuh ayam tipe medium lebih besar dibandingkan dengan tipe ringan. Selain itu, otot kaki dan dada pada ayam tipe medium juga lebih kokoh dan tebal. Ayam petelur tipe medium juga dinilai memiliki kemampuan produksi telur yang cukup tinggi dengan kulit telur berwarna coklat dan tebal (Sudarmono, 2003).

Ayam petelur tipe ringan juga disebut sebagai ayam petelur putih. Ayam petelur tipe ini memiliki tubuh yang lebih ramping dengan bulu berwarna putih bersih. Ayam ini umumnya memiliki jengger berwarna merah. Ayam tipe ringan berasal dari galur murni white *leghorn* dan banyak dijual dengan berbagai nama di Indonesia. Ayam tipe ringan mampu bertelur lebih dari 260 telur per tahun. Namun

kelemahan ayam ini adalah sangat rentan terhadap cuaca panas dan suara bising, sehingga dapat berdampak pada penurunan produksi (Rasyaf, 2002).

Pemeliharaan Ayam Petelur

Perkembangan Ayam Petelur

Peternakan ayam petelur merupakan usaha dengan padat modal, hal ini karena dalam usaha ternak ayam petelur umumnya diusahakan secara intensif dengan input bibit *day old chick* (DOC), Ayam petelur umumnya diusahakan secara intensif, pakan, investasi dan biaya pemeliharaan kandang, tenaga kerja dan *living cost* atau biaya hidup selama pemeliharaan dalam proses produksi (Paly, 2011). DOC menjadi faktor utama yang menunjang keberhasilan usaha ternak ayam petelur untuk mencapai produktivitas optimum. Oleh karena itu, dalam memilih DOC peternak harus memperhatikan kondisi dan parental dari DOC. DOC yang baik berasal dari indukan yang sehat, penampakan fenotip dengan bulu halus dan rapat, nafsu makan dan pertumbuhan baik dengan bobot tubuh berkisar 35-40 gram, serta tidak ada cacat fisik. Pemilihan bibit yang tepat akan mengurangi risiko dalam usaha ternak ayam layer.

Seperti halnya ayam ras lain, ayam petelur juga melewati tiga fase pertumbuhan yaitu *starter* atau disebut juga periode awal dari DOC sampai ayam berumur 6 minggu. Periode selanjutnya adalah *grower* Ketika ayam berumur 6-18 minggu. Setelah itu ayam memasuki fase produksi. Ayam petelur dapat berproduksi ketika memasuki umur 18-20 minggu. Jika nutrisi terpenuhi, ayam petelur dapat berproduksi hingga umur 80 minggu. Selanjutnya ayam akan memasuki fase afkir (Kartasudjana & Suprijatna, 2010). Menurut Scott *et al.* (1982) ayam petelur memiliki dua fase produksi yaitu pada fase pertama ketika ayam berumur 22-42 minggu. Rata-rata produksi pada fase pertama ini adalah 78% dengan rata-rata berat telur 56 gram. Pada fase kedua produksi menurun menjadi 72% yaitu ketika ayam memasuki umur 42-72 minggu. Namun pada fase ini, rata-rata berat telur meningkat menjadi 60 gram.

Kesejahteraan Ayam Petelur

Salah satu isi penting dan menjadi fokus perhatian publik adalah kesejahteraan hewan. Dalam dunia bisnis ayam petelur, isu kesejahteraan hewan beberapa waktu terakhir semakin meningkat. Oleh karena itu perlu komitmen yang kuat dalam mengikuti pedoman. Kesejahteraan hewan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kondisi fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan. Hal ini bertujuan untuk melindungi hewan yang dimanfaatkan manusia dari perlakuan yang tidak layak. Salah satu unsur penting yang menunjang kesejahteraan ayam petelur adalah nutrisi dan kondisi kandang yang memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan (Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, 2023).

Nutrisi Ayam Petelur

Nutrisi diperlukan dalam reaksi metabolisme untuk pertumbuhan dan reproduksi. Pemberian nutrisi perlu disiapkan pada pakan yang akan diberikan kepada ternak. Pakan yang mengandung nutrisi akan dikonsumsi, dicerna dan dimetabolisme dalam tubuh sampai ternak dapat berproduksi. Nutrien adalah zat organik dan anorganik dalam pakan yang dibutuhkan ternak (Sudradjat & Riyanti, 2019). Nutrisi bagi ayam petelur diperoleh dari pakan. Pakan ternak dapat berupa campuran berbagai macam bahan baku yang mengandung berbagai nutrisi yang dapat memenuhi kebutuhan ternak (Badan Standar Nasional, 2006). Nutrisi dalam pakan sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi dan proses pertumbuhan serta menunjang produksi telur yang optimal (Suprijatna *et al.*, 2005). Setiap jenis unggas memiliki kebutuhan pakan yang berbeda-beda, oleh karena itu pakan perlu disusun secara khusus sesuai dengan kebutuhan unggas. Pakan ayam petelur harus tinggi protein untuk menjamin pertumbuhan dan produksi telur (Rasyaf, 2002; Abidin, 2004). Kebutuhan protein pada setiap ayam bergantung pada kondisi ayam. Menurut Abidin (2004) pada fase layer ayam perlu mendapatkan asupan protein antara 17-19%. Sedangkan menurut Suprijatna *et al.* (2005) ayam petelur umur 24-29 minggu membutuhkan 20% asupan protein. Walaupun demikian, ukuran telur juga dipengaruhi oleh faktor genetik dan ukuran tubuh unggas (Leeson & Summers, 2005). Sumber protein pada pakan adalah

semua bahan pakan ternak dengan kandungan protein minimal 20% (Lubis, 1992). Bahan pakan dengan kandungan protein minimal 20% dengan serat kasar kurang dari 18% umumnya berasal dari tumbuhan, hewan dan ikan (Tilman *et al.*, 1991). Unggas memerlukan pakan untuk hidup pokok, pertumbuhan, pertumbuhan bulu dan produksi telur (Bell & Weaver, 2002). Ayam petelur umur 18-32 Minggu memerlukan energi metabolis 260 kkal/ekor/hari dengan kebutuhan protein 20 g/ekor/hari (Leeson & Summers, 2005).

Kandang Ayam Petelur

Untuk hasil produksi maksimal, diperlukan kandang yang sehat dan nyaman bagi unggas. Kandang menjadi tempat tinggal dan hidup ayam. Kandang harus menyediakan lingkungan yang nyaman bagi unggas agar unggas terhindar dari kondisi stress. Dengan kondisi kandang yang baik, kesehatan ternak dapat terjaga sehingga produksi dapat optimal (Suprijatna *et al.*, 2005). Agar sirkulasi udara baik, kandang dapat dibuat dengan sistem dinding terbuka sehingga mengurangi udara panas di dalam kandang. Kandang dapat dibuat dengan susun berderet dan berbentuk sangkar atau dikenal dengan sistem *battery*. Dalam setiap ruang hanya dapat menampung 1-2 ekor ayam. Kandang sistem *battery* ini memiliki keuntungan pada kesehatan individual unggas yang dapat terkontrol. Selain itu, tingkat produksi individual unggas juga mudah terukur. Kelebihan lain dari sistem *battery* ini adalah menghindari pertarungan antar unggas dan penyakit tidak mudah menular (Priyatno, 2004). Kondisi kandang juga harus memenuhi beberapa prinsip diantaranya sirkulasi udara yang baik, sinar matahari cukup pada pagi hari, tidak boleh terkena sinar matahari sepanjang hari, permukaan lahan peternakan baik. Oleh karena itu kandang umumnya dibuat dengan sistem terbuka (Rasyaf, 2002). Untuk memperoleh sinar matahari yang cukup sebaiknya kandang dibangun membujur dari arah timur ke barat.

Dalam melaksanakan usaha ternak ayam petelur setidaknya peternak harus memiliki 4 tipe jenis kandang yaitu kandang starter, kandang grower, kandang layer dan kandang karantina. Kandang starter disebut juga *artificial brooder* digunakan untuk memelihara ayam petelur umur 1-8 minggu. Suhu pada kandang ini harus dapat diatur sesuai dengan kebutuhan ayam. Bentuk kandang starter ada dua jenis

yaitu kotak permanen dan melingkar. Kandang grower digunakan pada ayam layer yang berumur 9-20 minggu. Kandang layer diperlukan saat ayam petelur memasuki periode produksi dapat dibuat dengan sistem *battery*, postal penuh maupun kombinasi litter dengan slat. Kandang karantina dibuat sedikit agak jauh dari kandang lainnya namun masih dalam satu lokasi peternakan. Tujuan pembuatan kandang ini adalah untuk memisahkan ayam yang sakit agar tidak menular ke ayam sehat lainnya.

Pengolahan Produk, Distribusi, dan Pemasaran Produk

Subsistem penanganan atau pengolahan hasil ternak terdiri dari lingkup keseluruhan kegiatan mulai dari penanganan pasca panen sampai pada pengolahan lanjutan dengan tujuan untuk menambah nilai dari produk utama. Kegiatan penanganan dan pengolahan produk sangat penting karena dapat meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan. Pada akhirnya kegiatan ini dapat meningkatkan pendapatan peternak.

Distribusi adalah proses penyaluran produk dari produsen sampai ke konsumen. Mata rantai pertama dalam proses ini adalah produsen, sedangkan yang bertindak sebagai mata rantai terakhir adalah konsumen. Subsistem pemasaran mencakup pemasaran hasil peternakan untuk memenuhi permintaan pasar. Proses pemasaran komoditas atau produk ternak (dalam hal ini adalah telur ayam layer) memiliki beberapa fungsi yang harus dipahami oleh produsen maupun lembaga pemasaran lain sehingga tidak timbul masalah dalam proses pemasaran (Prasetyo *et al.*, 1999).

2.6.9 Model dan Strategi Agribisnis

Penerapan dan pemanfaatan kekuatan, peluang, kelemahan dan tantangan perlu dilakukan dalam pengembangan ternak ayam petelur (Novita *et al.*, 2023). Beberapa aspek dalam upaya pengembangan agribisnis yang dapat ditempuh diantaranya adalah pengembangan sektor agribisnis yang dilakukan secara simultan dan harmonis. Membangun agribisnis adalah suatu proses membangun keunggulan sehingga dapat bersaing melebihi keunggulan komparatif. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan inovasi dan diperlukan orientasi dalam pengelolaan sistem agribisnis misalnya dengan peningkatan nilai tambah. Dengan demikian dapat

menyesuaikan dengan permintaan pasar dan dapat merespon perubahan selera konsumen secara efisien. Dukungan dari semua pihak yang berkaitan dengan agribisnis peternakan sangat diperlukan untuk menggerakkan sistem agribisnis, dalam proses penggerakan sistem diperlukan koordinator yang dapat mengkoordinir keharmonisan sistem Agribisnis.

Terdapat beberapa strategi pengembangan agribisnis yang dapat dijadikan alternatif dalam peternakan ayam petelur diantaranya:

1. Strategi *strengths-opportunities* (S-O), strategi ini menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal pada agribisnis peternakan ayam petelur. Kekuatan internal memanfaatkan tren dan kejadian eksternal. Dalam strategi ini dijalankan dengan cara mempertahankan dan juga meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar. Selain itu juga dilakukan perluasan pasar sehingga dapat menyerap produksi dan memperluas distribusi serta pemasaran untuk menjadi market leader.
2. Strategi *strengths-threats* (S-T), kekuatan menjadi kunci untuk mengatasi atau menghindari pengaruh dari ancaman eksternal. Dalam strategi ini, peningkatan produksi dapat ditempuh melalui pengawasan terhadap hama dan penyakit ternak, sehingga usaha peternakan dapat berlanjut.
3. Strategi *weakness-opportunities* (W-O), strategi ini mengedepankan upaya untuk memperbaiki atau memperkecil kelemahan internal. Cara yang ditempuh adalah dengan memanfaatkan keuntungan dari setiap peluang. Untuk memperlancar strategi ini, dapat menggunakan cara memberikan jaminan dalam modal dan optimalisasi petugas lapang.
4. Strategi *weakness- threats* (W-T), cara ini diarahkan untuk meminimalkan kelemahan internal dan juga mengantisipasi ancaman eksternal (Kurniawan *et al.*, 2013).

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Desain dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*mixed method*) yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kemitraan dalam usaha peternakan ayam petelur skala kecil. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan keunggulan dari kedua pendekatan guna menjawab permasalahan penelitian secara lebih mendalam. Data kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan melalui survei menggunakan kuesioner yang dirancang untuk menggali informasi mengenai aspek produksi, pemasaran, tantangan operasional, dan potensi pengembangan usaha peternakan. Selain itu, data pendukung diperoleh dari sumber sekunder seperti laporan industri, data statistik pemerintah, serta studi terdahulu yang relevan.

Penelitian ini bersifat non-eksperimen dan menggunakan pendekatan survei untuk memperoleh data primer secara langsung dari responden di lapangan, baik melalui kuesioner maupun diskusi kelompok terarah (FGD). Survei digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden serta menjelaskan hubungan antara struktur kemitraan, variabel mediasi, dan keberlanjutan usaha. Menurut Nazir (2005), survei merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta dari gejala yang ada dan mencari keterangan faktual tentang suatu objek dengan pendekatan sistematis. Teknik penentuan sampel dilakukan secara *purposive*, yaitu dengan memilih responden peternak yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, agar data yang diperoleh relevan dengan tujuan dan fokus penelitian.

3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian dan Variabel Kontekstual

Variabel karakteristik peternak dan usaha digunakan sebagai variabel deskriptif dan kontrol, sedangkan analisis kausal difokuskan pada hubungan kemitraan bermediasi, mediasi usaha, produktivitas, dan keberlanjutan. Berikut adalah definisi operasional dari beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian yang disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Definisi operasional

No	Variabel	Indikator	Dimensi	Satuan	Skala pengukuran
1	Karakteristik peternak	1. Umur	Usia peternak yang tergabung dalam kelompok bermediasi	Tahun	Rasio
		2. Pendidikan	Lamanya peternak menempuh Pendidikan formal	Tahun	Rasio
		3. Pengalaman	Lamanya peternak dalam usaha ternak ayam petelur	Tahun	Rasio
		4. Identitas anggota rumah tangga	Data mengenai anggota rumah tangga yang dinafkahi, baik yang tinggal serumah atau tidak		Rasio
		5. Kepemilikan aset	Jumlah harta benda yang dimiliki peternak	Jumlah	Rasio
		6. Status tempat tinggal	Status kepemilikan tempat tinggal	1 = Ya 2 = Tidak	Ordinal
		7. Pendidikan non formal	Jumlah pelatihan atau kursus yang pernah diikuti terkait dengan usaha ternak yang dijalani dalam periode tertentu	1 = Ya 2 = Tidak	Ordinal
2	Karakteristik usaha peternakan	1. Lahan	Luas lahan yang dikuasai dan digunakan untuk usaha peternakan	M ²	Rasio
		2. Kandang	Ukuran kandang yang dimiliki	M ²	Rasio
		3. Egg tray	Jumlah egg tray	Jumlah	Rasio
		4. Tempat pakan, minum, grit	Jumlah tempat pakan, minum, grit	Jumlah	Rasio
		5. Jumlah bibit	Banyaknya populasi bibit	Jumlah	Rasio
		6. Ayam dara	Jumlah ayam dara yang hidup	Jumlah	Rasio
		7. Ayam mati	Jumlah ayam mati	Jumlah	Rasio

Tabel 2. Definisi operasional (lanjutan)

No	Variabel	Indikator	Dimensi	Satuan	Skala pengukuran
		8. Jumlah tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam usaha peternakan	HOK	Rasio
		9. Listrik	Besaran biaya listrik yang dibayar per hari	Rupiah	Rasio
		10. Biaya transportasi	Besaran biaya transportasi untuk mobilitas usaha ternak	Rupiah	Rasio
		11. Pakan	Besaran jumlah dan biaya pakan yang dibayar per hari	kg, Rupiah	Rasio
		12. Obat - obatan	Besaran jumlah dan biaya obat – obatan yang dibayar per hari	Rupiah	Rasio
		13. Jumlah telur	Jumlah telur yang dihasilkan per hari	Butir	Rasio
		14. Berat	Berat telur yang dihasilkan per hari	Gram	Rasio
		15. Kotoran	Berat kotoran yang dihasilkan per hari	Gram	Rasio
3	Pendapatan rumah tangga petani	Pendapatan usaha peternakan	Besaran pendapatan yang diperoleh dari usaha ternak per bulan	Rupiah	rasio
		Pendapatan usahatani	Besaran pendapatan yang diperoleh dari usahatani di luar usaha ternak utama per bulan	Rupiah	rasio
		Pendapatan usahatani di luar usahatani dan non usahatani	Besaran pendapatan yang diperoleh dari usahatani di luar usahatani milik sendiri dan non usahatani per bulan	Rupiah	rasio
4	Pengeluaran rumah tangga	Pengeluaran pangan	Sejumlah pengeluaran yang dibayarkan oleh rumah tangga peternak untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga	Rupiah	rasio
		Pengeluaran non pangan	Sejumlah pengeluaran yang dibayarkan oleh rumah tangga peternak untuk memenuhi kebutuhan di luar kebutuhan pangan rumah tangga	Rupiah	rasio

Tabel 3. Definisi operasional (lanjutan)

No	Variabel	Indikator	Dimensi	Satuan	Skala pengukuran
5	Persepsi terhadap kemitraan bermediasi		Sejumlah poin -poin yang membentuk persepsi peternak terhadap kemitraan bermediasi	5= sangat setuju-1= sangat tidak setuju	Ordinal
6	Aspek – aspek keberlanjutan dalam kemitraan bermediasi		Sejumlah poin – poin yang menjelaskan aspek keberlanjutan usaha ternak yang dilakukan oleh pelaku usaha	5= sangat setuju-1= sangat tidak setuju	Ordinal

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian

Survei dan pengumpulan data dilakukan pada pelaku usaha peternakan ayam petelur skala kecil di Kabupaten Lampung Timur. Survei dilaksanakan pada bulan November s.d. Desember 2024. Pemilihan lokasi dan responden berdasarkan pertimbangan bahwa Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu sentra utama produksi telur ayam ras di Provinsi Lampung. Daerah ini memiliki konsentrasi usaha peternakan ayam petelur yang cukup tinggi, serta memiliki keterkaitan erat dengan rantai pasok telur di tingkat regional maupun nasional. Selain itu, keberadaan perusahaan mitra seperti CV Gunung Harta yang menjadi mitra utama dalam sistem kemitraan peternak juga menjadikan wilayah ini representatif untuk mengkaji dinamika kemitraan agribisnis di sektor peternakan ayam petelur.

Seluruh responden dalam penelitian ini merupakan peternak ayam petelur yang telah terlibat dalam skema kemitraan produksi dengan CV Gunung Harta. Dalam pelaksanaannya, perusahaan mitra menyediakan sarana produksi utama, seperti ayam dara, pakan, dan obat-obatan, serta menyerap hasil produksi telur dari peternak. Hubungan kemitraan tersebut difasilitasi oleh koperasi yang berperan sebagai mediator antara perusahaan dan peternak. Namun demikian, peran mediasi yang dijalankan masih bersifat operasional dan belum didukung oleh kejelasan kontrak tertulis serta dasar legalitas kemitraan yang kuat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hak dan kewajiban para pihak, khususnya dalam pembagian risiko usaha, mekanisme pengambilan keputusan, serta transparansi

informasi. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas kemitraan bermediasi menjadi penting untuk menilai sejauh mana pola kemitraan yang berjalan mampu mendukung keberlanjutan usaha peternak dari aspek ekonomi, sosial, dan kelembagaan.

3.4 Metode Penetapan Sampel

Penelitian ini dilaksanakan pada peternakan ayam petelur skala kecil di Kabupaten Lampung Timur. Populasi penelitian adalah seluruh peternak ayam petelur dengan kapasitas maksimal 10.000 ekor ayam, yang dipilih secara purposive berdasarkan kesesuaian dengan tujuan penelitian, yaitu mengkaji pelaksanaan dan dampak kemitraan bermediasi terhadap kinerja usaha peternakan rakyat. Desain penelitian bersifat eksploratif dengan pendekatan campuran (*mixed methods*), yang mengintegrasikan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika kemitraan usaha peternakan ayam petelur skala kecil. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya mengukur hubungan antarvariabel secara kuantitatif, tetapi juga menggali konteks, mekanisme, serta pengalaman subjektif peternak dalam pelaksanaan kemitraan.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui survei menggunakan kuesioner terstruktur untuk memperoleh informasi kuantitatif terkait aspek produksi, biaya, pendapatan, pemasaran, mekanisme kemitraan, serta tantangan operasional dan keberlanjutan usaha. Selain itu, data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap sejumlah peternak terpilih untuk menggali persepsi, pengalaman, dan praktik kemitraan secara lebih mendalam. Data sekunder diperoleh dari laporan industri perunggasan, data statistik pemerintah, serta studi terdahulu yang relevan. Penetapan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. peternak aktif minimal satu siklus produksi,
2. memiliki catatan produksi dan biaya usaha,
3. memiliki populasi ayam antara 1.000 hingga 10.000 ekor, dan
4. terlibat atau pernah terlibat dalam pola kemitraan usaha peternakan ayam petelur.

Berdasarkan data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Timur (2023), jumlah populasi peternak ayam petelur tercatat sebanyak 328 orang dengan kepemilikan ternak berkisar antara 200 hingga 225.000 ekor ayam. Dari jumlah tersebut, terdapat 101 peternak yang memiliki populasi ayam di bawah 10.000 ekor dan termasuk dalam kategori peternak skala kecil. Berdasarkan perhitungan dan mempertimbangkan ketersediaan populasi, ditetapkan jumlah sampel sebanyak 50 orang peternak ayam petelur skala kecil.

Seluruh responden merupakan peternak yang mengikuti skema kemitraan dengan perusahaan inti, yaitu CV Gunung Harta. Responden dipilih secara purposive untuk merepresentasikan karakteristik umum peternakan rakyat di wilayah penelitian, yang umumnya dikelola secara semi-intensif dengan tingkat adopsi teknologi serta akses terhadap sarana produksi yang bervariasi. Pemilihan responden dalam rentang skala tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang representatif mengenai praktik kemitraan, mekanisme mediasi usaha, serta dinamika produktivitas dan keberlanjutan peternakan ayam petelur skala kecil di Kabupaten Lampung Timur.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner terstruktur yang dirancang untuk mengukur variabel kemitraan bermediasi, mekanisme mediasi usaha, produktivitas, dan keberlanjutan usaha peternakan ayam petelur, serta didukung oleh wawancara mendalam dengan peternak guna memperkuat dan memperkaya interpretasi hasil analisis kuantitatif. Sementara itu, data sekunder meliputi data biaya dan penerimaan usaha peternakan, statistik harga input dan output, serta berbagai referensi terkait inflasi dan kebijakan sektoral yang relevan sebagai dasar pendukung analisis.

3.6 Definisi Operasional Variabel

3.6.1 Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kemitraan bermediasi (X), yang didefinisikan sebagai model kerja sama usaha di mana terdapat pihak ketiga atau

mediator yang berperan dalam menghubungkan peternak dengan perusahaan mitra. Variabel ini diukur menggunakan beberapa indikator utama, yaitu akses terhadap input, pendampingan teknis, transparansi kontrak, dan mekanisme penyelesaian konflik. Keempat indikator tersebut dipilih untuk menangkap secara komprehensif sejauh mana kemitraan bermediasi mampu meningkatkan efektivitas hubungan antara peternak dan perusahaan, sekaligus mendukung keberhasilan operasional dan keberlanjutan usaha peternakan ayam petelur.

3.6.2 Variabel Mediasi

Variabel mediasi dalam penelitian ini adalah mediasi usaha (M), yang menggambarkan peran lembaga mediator dalam menurunkan risiko usaha, meningkatkan efisiensi, serta memperlancar koordinasi antara peternak dan mitra perusahaan.

3.6.3 Variabel Dependen

Variabel dependen terdiri dari dua aspek, yaitu produktivitas usaha (Y_1) dan keberlanjutan usaha (Y_2). Produktivitas usaha diukur berdasarkan output telur per ekor per periode, sedangkan keberlanjutan usaha dievaluasi melalui dimensi ekonomi, sosial, dan operasional, untuk menangkap sejauh mana praktik usaha yang diterapkan mampu menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi peternak dan lingkungan usaha secara keseluruhan.

3.7 Metode Analisis

3.7.1 Analisis Tujuan 1 dan 2

Model Regresi Linear Berganda

Model analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis tujuan pertama dan tujuan kedua, yaitu mengkaji pengaruh kemitraan bermediasi terhadap mekanisme mediasi usaha, serta menganalisis pengaruh kemitraan bermediasi terhadap produktivitas dan keberlanjutan usaha peternakan ayam petelur skala kecil. Pendekatan regresi dipilih karena mampu menjelaskan hubungan kausal antarvariabel secara kuantitatif dan mengukur besarnya kontribusi

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, penggunaan regresi linear berganda memungkinkan pengujian peran variabel mediasi dalam kerangka model kausal X–M–Y, sehingga dapat mengidentifikasi apakah pengaruh kemitraan terhadap kinerja usaha terjadi secara langsung atau melalui perbaikan mekanisme mediasi usaha.

1. Model Regresi Pengaruh Kemitraan Bermediasi terhadap Mediasi Usaha.

Pengaruh kemitraan bermediasi terhadap mediasi usaha dianalisis menggunakan regresi berganda (Hayes, 2022) dengan model sebagai berikut:

$$M = \alpha_0 + \alpha_1 X + \varepsilon_1$$

dengan

M = Variabel *mediasi usaha* (variabel mediator) yang dipengaruhi oleh kemitraan.

X = Variabel *kemitraan* (variabel independen/bebas).

α_0 = Konstanta (intercept), yaitu nilai M ketika X = 0.

α_1 = Koefisien regresi, menunjukkan besarnya pengaruh kemitraan (X) terhadap mediasi usaha (M).

ε_1 = Error term / residual, yaitu faktor lain di luar model yang memengaruhi M namun tidak dimasukkan dalam persamaan.

2. Model Regresi Pengaruh Mediasi Usaha terhadap Produktivitas dan Keberlanjutan

Pengaruh mediasi usaha terhadap produktivitas dan keberlanjutan dianalisis dengan menggunakan model yang sama yaitu:

$$Y_1 = \beta_0 + \beta_1 M + \beta_2 X + \varepsilon_2$$

dengan

Y_1 = Variabel dependen, yaitu produktivitas/keberlanjutan usaha.

M = Variabel *mediasi usaha* (variabel mediator)/skala Likert

X = Variabel *kemitraan* (variabel independen)/skala Likert

β_0 = Konstanta (intercept), yaitu nilai Y_1 ketika M dan X bernilai nol.

β_1 = Koefisien regresi yang menunjukkan pengaruh mediasi usaha (M) terhadap produktivitas/keberlanjutan usaha (Y_1) dengan mengendalikan variabel X.

β_2 = Koefisien regresi yang menunjukkan pengaruh langsung kemitraan (X) terhadap produktivitas/keberlanjutan usaha (Y_1) dengan mengendalikan variabel M.

ε_2 = Error term / residual, yaitu faktor-faktor lain di luar model yang memengaruhi Y_1 namun tidak dimasukkan dalam persamaan.

Seluruh model dianalisis menggunakan regresi linear berganda, dengan tingkat signifikansi 5%. Efek mediasi diuji menggunakan pendekatan Baron & Kenny (1986), dengan tahapan:

1. X berpengaruh signifikan terhadap Y,
2. X berpengaruh signifikan terhadap M,
3. M berpengaruh signifikan terhadap Y,
4. Pengaruh X terhadap Y menurun setelah M dimasukkan ke dalam model.

3.7.2 Analisis Finansial Usaha Peternakan Ayam Petelur Skala Kecil

Analisis kinerja ekonomi usaha dilakukan setelah pengujian regresi dan analisis mediasi sebagai bentuk validasi ekonomi terhadap hubungan kausal yang diperoleh dalam model penelitian. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengaruh kemitraan bermediasi dan mekanisme mediasi usaha yang terbukti signifikan secara statistik juga tercermin secara nyata dalam kinerja finansial usaha peternakan ayam petelur skala kecil. Dengan demikian, analisis ekonomi berfungsi sebagai penguatan empiris atas temuan kuantitatif dalam kerangka kausal X–M–Y.

Struktur analisis usaha difokuskan pada pengukuran kinerja finansial melalui sejumlah indikator ekonomi utama, yaitu total pendapatan, total biaya variabel, total biaya tetap, laba bersih, titik impas atau *break even point* (BEP) baik dalam satuan unit produksi maupun nilai moneter, tingkat pengembalian investasi (*return on investment* / ROI), serta rasio manfaat terhadap biaya (*benefit–cost ratio* / B/C Ratio). Indikator-indikator ini dipilih karena mampu menggambarkan profitabilitas, efisiensi, risiko usaha, serta kelayakan ekonomi secara komprehensif.

Total Pendapatan (Total Revenue, TR)

Total pendapatan dihitung sebagai nilai keseluruhan penerimaan usaha yang berasal dari penjualan telur serta produk sampingan, seperti ayam afkir, kotoran ayam, dan karung bekas, dalam satu periode produksi (Putri *et al.*, 2024).

$$TR = \sum (Q_i + P_i)$$

dengan

Q_i = jumlah output ke-i (telur dan produk sampingan),

P_i = harga jual output ke-i.

Total Biaya Produksi

Total biaya produksi terdiri atas biaya variabel dan biaya tetap.

a. Total Biaya Variabel (Total Variable Cost, TVC)

Biaya variabel meliputi biaya pakan, obat-obatan, vaksin, tenaga kerja harian, dan biaya operasional lain yang berubah sesuai dengan volume produksi (Putri *et al.*, 2024).

$$TVC = \sum C_v$$

b. Total Biaya Tetap (Total Fixed Cost, TFC)

Biaya tetap meliputi penyusutan kandang dan peralatan, biaya manajemen, serta biaya lain yang relatif tidak berubah dalam jangka pendek (Putri *et al.*, 2024).

$$TFC = \sum C_f$$

c. Total Biaya Produksi (Total Cost, TC)

$$TC = TVC + TFC$$

Laba Bersih (Net Profit, π)

Laba bersih merupakan selisih antara total pendapatan dan total biaya produksi. Indikator ini digunakan untuk menilai kemampuan usaha dalam menghasilkan keuntungan secara absolut (Putri *et al.*, 2024).

$$\pi = TR - TC$$

Break Even Point (BEP)

BEP digunakan untuk mengukur tingkat risiko usaha dengan menunjukkan titik di mana usaha tidak mengalami laba maupun rugi (Putri *et al.*, 2024).

a. BEP dalam nilai rupiah

$$BEP_{Rp} = BEP_{unit} \times P$$

Semakin rendah nilai BEP, semakin kecil risiko kegagalan finansial usaha.

b. Payback Period (PP)

$$PP = \frac{\text{Investasi awal}}{\text{Arus kas bersih per periode}}$$

Return on Investment (ROI)

ROI digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal dan kemampuan usaha dalam menghasilkan pengembalian investasi (Widyanto dan Santoso, 2024).

$$ROI(\%) = \frac{\pi}{\text{Total investasi}} \times 100\%$$

Benefit–Cost Ratio (B/C Ratio)

B/C Ratio digunakan untuk menilai kelayakan ekonomi usaha secara relatif (Widyanto dan Santoso, 2024).

$$B/C_{Ratio} = \frac{TR}{TC}$$

dengan kriteria pengambilan keputusan adalah:

B/C > 1: usaha layak dan menguntungkan,

B/C = 1: usaha berada pada titik impas,

B/C < 1: usaha tidak layak.

Analisis Pertumbuhan Usaha Antar-Periode

Untuk mengevaluasi dinamika kinerja usaha, dilakukan analisis pertumbuhan antar-periode terhadap indikator utama seperti pendapatan, laba bersih, dan ROI (Widyanto dan Santoso, 2024). Laju pertumbuhan dihitung dengan rumus:

$$Growth_t(\%) = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\%$$

dengan

X_t = nilai indikator pada periode ke- t ,

X_{t-1} = nilai indikator pada periode sebelumnya.

Analisis Antar-Periode dan Proyeksi

Analisis antar-periode dilakukan untuk membandingkan kinerja usaha sebelum, selama, dan setelah penerapan kemitraan bermediasi. Periode pengamatan dibagi menjadi tiga tahap, yaitu pra-kemitraan (P-5 sampai dengan P-1), periode penerapan kemitraan (P), serta pasca-kemitraan yang telah mencapai kondisi stabil (P+1 sampai dengan P+5). Pembagian ini memungkinkan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap dampak kemitraan bermediasi terhadap produktivitas dan keberlanjutan usaha dalam jangka menengah.

Proyeksi nilai ekonomi pada periode P+1 hingga P+5 dihitung dengan mempertimbangkan laju inflasi tahunan menggunakan rumus seperti yang digunakan oleh Buchanan (2014):

$$X_t = X_0(1 + i)^t$$

dengan

X_t = nilai variabel pada periode ke- t ,

X_0 = nilai dasar periode P,

i = tingkat inflasi,

t = periode proyeksi.

Net Present Value (NPV)

NPV adalah selisih antara nilai sekarang dari seluruh arus kas masuk dengan nilai sekarang dari investasi awal, dengan mempertimbangkan nilai waktu uang (*time value of money*) (Buchanan, 2014).

$$NPV = \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t} I_0$$

dengan

CF_t = arus kas bersih pada periode ke-t

r = tingkat diskonto (suku bunga / tingkat pengembalian yang diharapkan)

t = periode ke-t

I₀ = investasi awal

n = jumlah periode analisis

Internal Rate of Return IRR

IRR menunjukkan tingkat bunga maksimum yang bisa ditoleransi oleh sebuah proyek agar tetap layak secara finansial (Buchanan, 2014).

$$IRR = \frac{\text{Biaya Tetap}}{\text{Laba Bersih}} - 1$$

Pendekatan ini digunakan untuk mensimulasikan kondisi ekonomi riil dengan asumsi bahwa sistem kemitraan bermediasi telah mencapai kondisi stabil. Hasil analisis regresi dimanfaatkan untuk menjelaskan mekanisme kausal dalam peningkatan produktivitas dan keberlanjutan usaha, sementara analisis usaha tani digunakan untuk menggambarkan implikasi finansial nyata yang dihasilkan dari penerapan kemitraan bermediasi. Integrasi kedua pendekatan tersebut menghasilkan bukti empiris yang komprehensif mengenai efektivitas kemitraan bermediasi dalam meningkatkan kinerja usaha dan keberlanjutan peternak ayam petelur skala kecil.

3.8 Analisis Perumusan Rekomendasi Kebijakan dan Strategi Pengembangan

Tujuan keempat dari penelitian ini adalah merumuskan rekomendasi kebijakan yang mendukung implementasi model kemitraan bermediasi di sektor peternakan

ayam petelur. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) yang dikembangkan lebih lanjut melalui pendekatan matriks TOWS. Faktor-faktor internal dan eksternal dalam analisis SWOT diturunkan dari sintesis hasil analisis regresi berganda, analisis mediasi, serta analisis kinerja usaha peternakan ayam petelur, dan diperkaya dengan temuan kualitatif dari wawancara mendalam dan forum diskusi kelompok terfokus (FGD).

Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal sistem kemitraan bermediasi, serta peluang dan ancaman eksternal yang memengaruhi keberhasilan implementasinya. Identifikasi dilakukan melalui kajian literatur, wawancara mendalam, dan FGD dengan para pemangku kepentingan, seperti peternak, koperasi, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Langkah-langkah analisis meliputi:

1. Identifikasi faktor SWOT berdasarkan data primer dan sekunder;
2. Formulasi strategi TOWS yang mencakup strategi SO, WO, ST, dan WT;
3. Validasi strategi kebijakan melalui FGD lanjutan dengan pakar dan pemangku kepentingan;
4. Perumusan kerangka rekomendasi kebijakan yang memuat skenario dan langkah-langkah implementatif.

Pendekatan SWOT–TOWS dipilih karena sifatnya yang partisipatif dan fleksibel, memungkinkan integrasi perspektif multipihak serta mempertimbangkan dinamika konteks lokal. Output dari analisis ini berupa kerangka strategi dan kebijakan yang aplikatif sebagai rujukan bagi pembuat kebijakan dan pelaku usaha dalam pengembangan kemitraan bermediasi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB IV. KEADAAN UMUM WILAYAH STUDI

4.1 Uraian Lokasi Secara Geografis

Kabupaten Lampung Timur secara geografis berada di antara $105^{\circ}15'$ hingga $106^{\circ}20'$ Bujur Timur dan $4^{\circ}37'$ hingga $5^{\circ}37'$ Lintang Selatan. Luas wilayah kabupaten ini mencapai sekitar $5.325,03 \text{ km}^2$, yang setara dengan kurang lebih 15% dari total luas Provinsi Lampung, yaitu sekitar 35.376 km^2 . Pusat pemerintahan atau ibu kota kabupaten terletak di Sukadana. Secara administratif, Kabupaten Lampung Timur memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Rumbia, Seputih Surabaya, dan Seputih Banyak yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Di sebelah timur berbatasan langsung dengan Laut Jawa, yang merupakan bagian dari wilayah perairan Provinsi Banten dan DKI Jakarta.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan beberapa kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Tanjung Bintang, Ketibung, Palas, dan Sidomulyo.
4. Di bagian barat, wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Bantul dan wilayah Metro Raya di Kota Metro, serta Kecamatan Seputih Raman di Kabupaten Lampung Tengah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, 2023).

Secara topografis, wilayah ini didominasi oleh dataran rendah dan lahan bergelombang ringan yang sangat cocok untuk pengembangan sektor pertanian dan peternakan. Ketinggian wilayah umumnya berada di kisaran 25 hingga 100 meter di atas permukaan laut. Iklim di Lampung Timur termasuk dalam iklim tropis basah dengan dua musim utama, yaitu musim hujan (sekitar Oktober–Maret) dan musim kemarau (sekitar April–September). Curah hujan rata-rata tahunan berkisar antara

2.000–2.500 mm, sedangkan suhu udara harian berkisar antara 23°C–32°C. Kondisi agroklimat ini sangat mendukung bagi kegiatan agribisnis, khususnya pada subsektor peternakan ayam petelur yang membutuhkan suhu stabil dan kelembaban relatif sedang. Kabupaten Lampung Timur memiliki akses transportasi yang baik dan relatif dekat dengan Kota Metro dan Bandar Lampung. Infrastruktur jalan utama yang menghubungkan antar kecamatan dan akses ke pasar regional memberikan kemudahan distribusi hasil produksi peternakan ke wilayah lain, termasuk Bandar Lampung dan Provinsi Banten (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Timur, 2023).

4.2 Uraian Demografis

Berdasarkan data BPS (2023), jumlah penduduk Kabupaten Lampung Timur mencapai lebih dari 1,12 juta jiwa dengan rasio jenis kelamin yang hampir seimbang. Mayoritas penduduk merupakan kelompok usia produktif (15–64 tahun), yaitu sekitar 70%, menunjukkan potensi tenaga kerja lokal yang besar untuk sektor pertanian dan peternakan.

Penduduk di wilayah ini terdiri dari latar belakang etnis yang beragam, seperti Jawa, Lampung, dan Sunda, hasil dari program transmigrasi sejak tahun 1980-an. Keberagaman sosial ini turut memengaruhi pola usaha pertanian dan peternakan yang adaptif dan beragam. Tingkat pendidikan sebagian besar berada pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, namun kesadaran terhadap adopsi teknologi semakin meningkat seiring adanya program penyuluhan dan pelatihan dari pemerintah daerah (Badan Pusat Statistik, 2023).

Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani, peternak, dan buruh tani. Sebagian lainnya bekerja sebagai pedagang kecil atau pelaku usaha rumah tangga berbasis agribisnis. Kegiatan ekonomi masyarakat cenderung padat karya dan berbasis sumber daya lokal, menjadikan sektor pertanian dan peternakan sebagai tulang punggung ekonomi wilayah.

4.3 Uraian Perkembangan Agribisnis Ayam Petelur

Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu sentra agribisnis unggulan di Provinsi Lampung, terutama dalam subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Salah satu subsektor yang mengalami pertumbuhan paling pesat adalah peternakan ayam petelur. Berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Timur (2023), populasi ayam petelur telah mencapai lebih dari lima juta ekor yang tersebar di berbagai kecamatan, dengan konsentrasi terbesar di Kecamatan Purbolinggo, Sukadana, dan Batanghari. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa Lampung Timur memiliki posisi strategis dalam mendukung pasokan telur ayam ras, tidak hanya untuk kebutuhan konsumsi regional, tetapi juga untuk memenuhi permintaan antarprovinsi, khususnya ke wilayah Bandar Lampung, Metro, dan sebagian Sumatera Selatan.

Perkembangan pesat peternakan ayam petelur di Lampung Timur didukung oleh sejumlah faktor strategis. Pertama, ketersediaan lahan yang luas dan relatif terjangkau memungkinkan pengembangan skala usaha yang bervariasi, mulai dari peternak kecil hingga menengah. Kedua, ketersediaan tenaga kerja lokal yang berlimpah menjadi faktor penunjang penting bagi kegiatan budidaya. Ketiga, kedekatan wilayah dengan pusat pasar regional seperti Kota Metro dan Bandar Lampung memudahkan distribusi produk telur segar ke pasar konsumen. Keempat, dukungan infrastruktur jalan dan transportasi yang terus berkembang turut memperkuat efisiensi rantai pasok. Meskipun demikian, peternak skala kecil masih menghadapi berbagai kendala struktural seperti keterbatasan modal, akses terhadap pakan berkualitas, teknologi produksi, serta fluktuasi harga input dan output yang sering kali tidak seimbang.

Sebagian besar peternakan ayam petelur di Kabupaten Lampung Timur dikelola secara semi-intensif dengan sistem kandang baterai atau kandang terbuka. Skala usaha yang dijalankan peternak cukup bervariasi, mulai dari 1.000 hingga 50.000 ekor ayam. Berdasarkan data lapangan, jumlah peternak ayam petelur skala kecil di Lampung Timur tercatat sebanyak 288 peternak, namun hanya 50 peternak yang telah terlibat dalam pola kemitraan (Dinas Peternakan dan Perikanan Lampung Timur, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar peternak masih

menjalankan usaha secara mandiri dengan keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, dan pasar.

Fokus penelitian ini diarahkan pada peternak skala kecil dengan populasi ayam antara 1.000–10.000 ekor, karena kelompok ini merupakan segmen yang paling rentan terhadap fluktuasi harga pakan dan harga telur, serta memiliki posisi tawar yang relatif lemah dalam struktur agribisnis perunggasan. Dalam konteks sistem agribisnis, usaha peternakan ayam petelur dapat dianalisis melalui lima subsistem utama, yaitu subsistem input, proses produksi, output, pasar, dan subsistem penunjang, yang saling terkait dan menentukan kinerja serta keberlanjutan usaha peternakan.

a. Sub-sistem input.

Input utama dalam usaha peternakan ayam petelur skala kecil di Kabupaten Lampung Timur berasal dari beberapa sumber yang berbeda, baik dari tingkat lokal, regional, maupun nasional. Bibit ayam umur sehari (day old chick/DOC) umumnya diproduksi oleh perusahaan pembibitan unggas berskala nasional yang memiliki hatchery di Pulau Jawa atau Sumatera bagian selatan. DOC tersebut kemudian didistribusikan melalui agen resmi atau perusahaan inti mitra ke wilayah Lampung Timur. Peternak skala kecil jarang membeli DOC secara langsung dari hatchery karena keterbatasan volume pembelian, sehingga pasokan DOC lebih banyak diperoleh melalui skema kemitraan atau perantara pedagang.

Pakan merupakan input terbesar dalam struktur biaya produksi dan sebagian besar berasal dari pabrik pakan komersial berskala besar. Bahan baku pakan seperti jagung, bungkil kedelai, dan tepung ikan bersumber dari petani jagung domestik, pasar nasional, serta impor, terutama untuk bungkil kedelai. Pabrik pakan memproses bahan baku tersebut menjadi pakan jadi yang kemudian disalurkan ke peternak melalui distributor regional atau perusahaan mitra. Di tingkat peternak skala kecil, pembelian pakan umumnya dilakukan secara kredit melalui perusahaan inti atau koperasi mitra, sehingga harga pakan yang diterima peternak relatif lebih tinggi dibandingkan harga pasar tunai.

Obat-obatan, vitamin, dan vaksin sebagian besar diproduksi oleh perusahaan farmasi veteriner nasional dan multinasional, kemudian didistribusikan melalui toko sarana produksi peternakan (sapronak) di tingkat kabupaten atau kecamatan. Dalam praktiknya, peternak skala kecil sering memperoleh input ini melalui rekomendasi teknisi perusahaan mitra atau pendamping lapangan, sehingga pilihan merek dan dosis cenderung mengikuti arahan pihak penyedia, bukan berdasarkan keputusan mandiri peternak.

Peralatan kandang seperti tempat pakan dan minum, tray telur, serta bahan bangunan kandang umumnya bersumber dari produsen lokal atau toko bangunan setempat. Sementara itu, tenaga kerja berasal dari keluarga peternak sendiri atau masyarakat sekitar lokasi kandang, sehingga memiliki karakteristik padat karya dan berkontribusi langsung terhadap ekonomi pedesaan setempat.

Dalam skema kemitraan bermediasi, lembaga mediator seperti koperasi, lembaga pendamping, atau perguruan tinggi berperan menghubungkan peternak dengan berbagai sumber input tersebut secara lebih transparan dan efisien. Mediator tidak hanya memfasilitasi pengadaan input kolektif untuk menekan harga, tetapi juga memastikan kualitas input, keterbukaan informasi harga dan spesifikasi teknis, serta mengurangi ketergantungan peternak pada satu sumber pasokan. Dengan demikian, alur penyediaan input menjadi lebih seimbang, risiko usaha dapat ditekan, dan posisi tawar peternak skala kecil dalam sistem agribisnis ayam petelur dapat diperkuat.

b. Sub-sistem proses produksi.

Tahapan proses produksi ayam petelur mencakup kegiatan pemeliharaan ayam, pemberian pakan, pengaturan pencahayaan, pengelolaan kesehatan ternak, serta sanitasi kandang. Sistem produksi di Lampung Timur pada umumnya bersifat semi-intensif dengan tingkat adopsi teknologi yang masih terbatas. Penggunaan teknologi modern seperti sistem ventilasi otomatis, sensor pakan, atau manajemen biosekuriti berbasis digital masih jarang diterapkan oleh peternak kecil karena kendala modal dan keterampilan teknis. Padahal, efisiensi produksi sangat ditentukan oleh manajemen pakan, pengendalian penyakit, dan pengaturan

lingkungan kandang. Dalam konteks ini, model kemitraan bermediasi diharapkan dapat menjadi instrumen efektif untuk mendorong peningkatan efisiensi teknis melalui pelatihan manajemen produksi, pendampingan teknis berkelanjutan, serta penerapan prinsip-prinsip peternakan berkelanjutan (*sustainable poultry farming*) yang memperhatikan aspek kesejahteraan hewan, kesehatan lingkungan, dan efisiensi sumber daya.

c. Sub-sistem output.

Sub-sistem output dalam usaha peternakan ayam petelur skala kecil mencakup seluruh hasil produksi yang dihasilkan dari proses budidaya, baik produk utama maupun produk sampingan. Produk utama dari usaha ini adalah telur konsumsi yang dipasarkan secara rutin dan menjadi sumber pendapatan terbesar bagi peternak. Selain itu, terdapat produk sampingan berupa ayam afkir, pupuk kandang dari kotoran ayam, serta limbah organik lain yang berpotensi memberikan tambahan pendapatan apabila dikelola secara optimal.

Kualitas telur yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh manajemen pakan, kesehatan ternak, umur ayam, serta kondisi lingkungan kandang. Telur dengan ukuran seragam, cangkang kuat, dan warna kuning telur yang baik memiliki nilai jual lebih tinggi di pasar. Sementara itu, kuantitas produksi ditentukan oleh efisiensi produksi, tingkat kematian ayam, serta stabilitas sistem pemeliharaan. Pada peternakan ayam petelur skala kecil, keterbatasan akses terhadap pakan berkualitas, teknologi manajemen produksi, dan layanan kesehatan ternak sering menyebabkan fluktuasi produksi telur antar-periode (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2022).

Di Kabupaten Lampung Timur, sebagian besar peternak skala kecil menjual telur dalam bentuk curah (*bulk*) segera setelah panen tanpa melalui proses *grading*, sortasi, atau pengemasan yang memadai. Telur umumnya dijual kepada pedagang pengumpul lokal atau tengkulak dengan harga harian yang sangat bergantung pada kondisi pasar regional. Ketiadaan fasilitas pascapanen dan kelembagaan pemasaran menyebabkan peternak tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam penentuan

harga. Akibatnya, harga telur di tingkat peternak sering kali lebih rendah dibandingkan harga di tingkat konsumen akhir, dengan selisih margin yang dinikmati oleh pelaku perantara (Saragih, 2011).

Produk sampingan berupa ayam afkir biasanya dijual pada akhir siklus produksi atau saat produktivitas menurun. Ayam afkir menjadi sumber pendapatan tambahan yang relatif signifikan, namun harganya juga sangat fluktuatif dan dipengaruhi oleh kondisi pasar daging ayam ras. Sementara itu, kotoran ayam berpotensi dimanfaatkan sebagai pupuk organik atau bahan baku pupuk kompos, meskipun pada peternak skala kecil pemanfaatannya masih terbatas dan sebagian besar dijual tanpa pengolahan lebih lanjut. Limbah organik yang tidak dikelola dengan baik juga dapat menimbulkan permasalahan lingkungan dan sosial di sekitar lokasi kandang.

Fluktuasi harga telur yang tinggi, yang sering kali tidak seimbang dengan kenaikan harga pakan sebagai komponen biaya terbesar, menyebabkan margin keuntungan peternak skala kecil menjadi sangat tipis dan rentan terhadap guncangan pasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan pada sub-sistem output tidak hanya terkait aspek produksi, tetapi juga erat kaitannya dengan struktur pasar dan tata niaga yang belum berpihak pada peternak kecil (Badan Pusat Statistik, 2023).

Melalui penerapan sistem kemitraan bermediasi, sub-sistem output diharapkan dapat diperkuat melalui pengembangan mekanisme pemasaran kolektif, kontrak jual-beli yang lebih stabil, serta penerapan standar mutu dan penjadwalan distribusi yang lebih terencana. Peran mediator independen menjadi penting dalam menjembatani kepentingan peternak dan mitra usaha, memastikan transparansi harga, serta mendorong nilai tambah melalui grading, pengemasan, dan diversifikasi produk. Dengan demikian, kemitraan bermediasi tidak hanya berfungsi meningkatkan stabilitas pendapatan peternak, tetapi juga memperkuat keberlanjutan usaha ayam petelur skala kecil dalam sistem agribisnis yang lebih adil dan efisien.

d. Sub-sistem pasar

Pasar merupakan subsistem yang sangat menentukan keberlanjutan ekonomi peternak ayam petelur, karena disinilah produk hasil usaha diperdagangkan dan nilai ekonominya direalisasikan. Di Lampung Timur, rantai distribusi telur umumnya didominasi oleh pedagang pengumpul (*middlemen*), yang membeli telur langsung dari peternak lalu menjualnya ke pedagang besar atau pasar tradisional. Pola pemasaran semacam ini sering kali bersifat berlapis dan pendek telur mengalir dari peternak ke agen atau pengepul, kemudian ke pedagang pasar, dan akhirnya ke konsumen (misalnya melalui pasar tradisional di Lampung) tanpa keterlibatan lembaga pemasaran yang lebih terstruktur atau pasar modern. Fenomena rantai pasok semacam ini juga ditemukan pada analisis rantai pasok telur ayam di wilayah lain di Lampung, di mana aliran barang, uang, dan informasi terutama melewati saluran pengepul lalu pedagang pasar sebelum mencapai konsumen akhir, sehingga siklus pemasaran relatif panjang dan tidak langsung antara peternak dan konsumen akhir.

Ketergantungan terhadap pengepul menyebabkan posisi tawar peternak menjadi lemah, karena harga sering kali ditentukan oleh fluktuasi pasar jangka pendek, struktur permintaan lokal, dan kekuatan tawar yang terbatas di tingkat peternak. Selain itu, akses peternak kecil ke pasar modern atau lembaga pemasaran bersama masih sangat terbatas di banyak daerah, termasuk Lampung Timur, sehingga peluang memperoleh harga yang lebih kompetitif sering tidak terjangkau oleh produsen kecil. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian kelembagaan rantai pasok yang menunjukkan bahwa pemasaran telur di tingkat peternak rakyat cenderung mengikuti mekanisme pasar tradisional dengan keterbatasan akses ke pasar modern selain informasi harga yang tidak transparan (Sejati, 2011).

Untuk mengatasi kelemahan pasar semacam ini, sistem kemitraan bermediasi berpotensi memperkuat akses pasar peternak melalui pembentukan jaringan distribusi kolektif, promosi produk berbasis kualitas komoditas, dan fasilitasi kontrak penjualan langsung antara peternak dan pembeli besar seperti supermarket, hotel, atau institusi lainnya. Mediator dalam sistem kemitraan ini berperan strategis

dalam memfasilitasi perjanjian pemasaran, menjaga transparansi harga, serta menghubungkan peternak dengan lembaga penjamin mutu dan sertifikasi produk. Dengan adanya jaringan pemasaran yang lebih terorganisir dan akses pasar yang lebih luas, peternak kecil dapat mengurangi ketergantungan terhadap perantara, sehingga memperbaiki posisi tawar dan potensi pendapatan usaha secara signifikan.

e. Sub-sistem penunjang

Berdasarkan informasi dari responden, diketahui bahwa subsistem penunjang dalam agribisnis ayam petelur mencakup berbagai lembaga dan infrastruktur yang berfungsi mendukung keberlangsungan dan pengembangan usaha, antara lain lembaga keuangan, instansi pemerintah, lembaga penelitian dan pendidikan, asosiasi atau kelompok peternak, serta sarana transportasi dan teknologi informasi. Di Kabupaten Lampung Timur, dukungan subsistem penunjang terhadap peternak ayam petelur skala kecil masih relatif terbatas, khususnya dalam aspek akses pembiayaan, pendampingan teknis, dan inovasi manajemen usaha. Sebagian besar peternak kecil masih menghadapi kesulitan dalam mengakses pembiayaan formal seperti kredit perbankan atau KUR karena keterbatasan agunan, kapasitas administrasi, dan literasi keuangan.

Dari sisi kelembagaan teknis, pendampingan dan penyuluhan peternakan belum berlangsung secara intensif dan berkelanjutan. Penyuluhan umumnya bersifat umum dan insidental, serta belum sepenuhnya berfokus pada manajemen usaha ayam petelur skala kecil, termasuk aspek pencatatan keuangan, efisiensi pakan, dan pengelolaan risiko usaha. Akibatnya, banyak peternak masih mengelola usahanya secara konvensional berdasarkan pengalaman turun-temurun, tanpa dukungan inovasi teknologi dan manajemen modern yang memadai.

Infrastruktur fisik seperti jaringan jalan antar kecamatan di Lampung Timur relatif memadai sehingga mendukung distribusi hasil produksi. Namun demikian, dukungan infrastruktur penunjang lainnya, terutama teknologi informasi agribisnis dan sistem logistik rantai dingin (*cold chain*), masih sangat terbatas. Ketiadaan fasilitas penyimpanan dan distribusi berpendingin menyebabkan telur harus segera dijual setelah panen, sehingga peternak tidak memiliki fleksibilitas waktu dalam

pemasaran dan cenderung menerima harga yang ditetapkan oleh pedagang pengumpul.

Dalam konteks keterbatasan tersebut, keberadaan mediator dalam model kemitraan bermediasi menjadi sangat strategis. Mediator dapat berfungsi sebagai penghubung antara peternak dan lembaga penunjang, baik lembaga keuangan, instansi pemerintah, maupun lembaga pelatihan dan penelitian. Melalui peran ini, mediator dapat membantu memfasilitasi akses pembiayaan, meningkatkan intensitas pelatihan dan pendampingan manajemen usaha, serta memperkuat jejaring kelembagaan dalam sistem agribisnis ayam petelur. Dengan penguatan subsistem penunjang yang terkoordinasi, diharapkan peternak kecil dapat meningkatkan efisiensi usaha, daya saing, dan keberlanjutan ekonomi secara lebih stabil.

BAB VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kemitraan bermediasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja mediasi usaha pada peternakan ayam petelur skala kecil. Keberadaan mediator terbukti memperbaiki koordinasi, meningkatkan transparansi, memperjelas SOP, serta menurunkan risiko usaha yang sebelumnya dihadapi peternak secara individual. tetap menjadi kendala utama yang menekan margin keuntungan peternak.
2. Hasil analisis jalur menegaskan bahwa pengaruh kemitraan bermediasi terhadap produktivitas dan keberlanjutan usaha terutama bersifat tidak langsung, yaitu melalui peran mediasi usaha. Mekanisme mediasi terbukti menjadi variabel kunci yang memperkuat hubungan kausal antara kemitraan dan kinerja usaha, sehingga peningkatan produktivitas dan keberlanjutan tidak semata-mata berasal dari struktur kemitraan, tetapi dari kualitas fungsi mediasi yang dijalankan.
3. Kemitraan bermediasi memberikan implikasi positif terhadap kinerja usaha, yang tercermin dari laba usaha yang positif, nilai ROI sebesar 17,06%, B/C Ratio sebesar 1,17, serta tingkat BEP yang dapat dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa kemitraan bermediasi berkontribusi pada efisiensi biaya, stabilitas pendapatan, dan kelayakan finansial usaha peternakan ayam petelur skala kecil.
4. Berdasarkan temuan empiris dan masukan pemangku kepentingan, penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan mediator, regulasi kemitraan yang berkeadilan, penguatan koperasi peternak, serta pemanfaatan sistem digital sebagai strategi utama pengembangan kemitraan bermediasi. Secara keseluruhan, kemitraan bermediasi terbukti sebagai pendekatan kelembagaan yang efektif untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan peternakan ayam petelur skala kecil.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka beberapa saran berikut diajukan sebagai masukan untuk pengembangan usaha dan perumusan kebijakan terkait.

1. Bagi Peternak Ayam Petelur Skala Kecil
 - a) Peternak perlu meningkatkan efisiensi usaha melalui optimalisasi biaya pakan, pemanfaatan formulasi pakan alternatif, serta menerapkan praktik manajemen pemeliharaan yang lebih baik untuk menekan mortalitas dan meningkatkan produktivitas.
 - b) Penguatan kapasitas teknis dan literasi digital penting dilakukan agar peternak mampu mengakses pasar, informasi harga, dan inovasi teknologi secara lebih efektif.
 - c) Disarankan bagi peternak untuk bergabung dalam kelembagaan koperasi guna memperkuat posisi tawar, efisiensi rantai pasok, dan akses pembiayaan.
2. Bagi Perusahaan Mitra dan Pelaku Industri
 - a) Perusahaan kemitraan perlu menerapkan model kemitraan bermediasi secara konsisten dengan menjamin transparansi harga, akses input yang adil, serta mekanisme pembagian risiko yang seimbang.
 - b) Perusahaan diharapkan meningkatkan komitmen terhadap pendampingan teknis, penyediaan input berkualitas, dan adopsi teknologi digital untuk meminimalkan asimetri informasi dengan peternak.
3. Bagi Mediator dan Lembaga Pendamping
 - a) Mediator sebagai elemen kunci perlu diperkuat melalui sertifikasi kompetensi, pembiayaan operasional, dan skema insentif berbasis kinerja agar mampu menjalankan fungsi fasilitasi, monitoring, dan resolusi konflik secara efektif.
 - b) Perguruan tinggi dan lembaga riset perlu aktif terlibat dalam pendampingan berkelanjutan, pemutakhiran data produktivitas, serta pengembangan inovasi berbasis kebutuhan lapangan.

4. Bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat

- a) Pemerintah perlu menetapkan regulasi standar kemitraan ayam petelur yang menjamin keadilan kontraktual, melindungi peternak kecil, dan memastikan kepatuhan perusahaan.
- b) Perlu penguatan kelembagaan koperasi melalui pendampingan manajerial, digitalisasi layanan, serta integrasi dengan sistem perbankan dan pembiayaan inklusif.
- c) Pemerintah dapat mengalokasikan insentif fiskal dan non-fiskal, termasuk subsidi input strategis (DOC, pakan, obat), untuk menjaga keberlanjutan usaha dan ketahanan pangan daerah.

5. Bagi Penelitian Selanjutnya

- a) Disarankan untuk memperluas penelitian pada skala wilayah yang lebih luas atau komoditas unggas lain untuk menguji konsistensi model kemitraan bermediasi.
- b) Analisis mendalam terhadap perubahan perilaku pasar, risiko biologis, dan dinamika harga pakan penting dilakukan untuk memperkuat model prediksi keberlanjutan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Z. 2004. *Meningkatkan Produksi Ayam Ras Petelur*. Agromedia Pustaka. Jakarta.
- Afrianto I, Wahjuni S, & Djatna T. 2020. *Model of Ubiquitous Precision Livestock System 4.0: A Technological Review*. *FoITIC Proceedings*. Bandung, 28-30 September 2020. <https://eproceeding.itenas.ac.id/index.php/foitic/article/view/74>
- Alfatiha A, Marhawati, Said MI, & Amam ATA. 2025. Analisis Sosial Ekonomi Keberadaan Usaha Ayam Ras Petelur di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. 10(1): 30-41.
- Amam A & Rusdiana S. 2022. Peranan kelembagaan peternakan, sebuah eksistensi bukan hanya mimpi: Ulasan dengan metode Systematic Literature Review (SLR). *Jurnal Peternakan*. 19(1): 9-21. <https://doi.org/10/24014/jupet.v19i1.14244>.
- Anggreny S, Sumardjo DLP, & Syahyuti. 2025. *The Role of Stakeholders in Strengthening Communication Networks to Foster Farmers' Economic Institutions*. *Jurnal Penyuluhan Pertanian*. 20(1): 58-78. <https://doi.org/10.51852/rzdpjx51>.
- Anonim. 2020. Kunci Mencapai Keberhasilan Produksi Telur. PT. Medion Ardhika Bhakti. Bandung. <https://www.medion.co.id/kunci-mencapai-keberhasilan-produksi-telur/>.
- Ansell C & Gash A. 2007. Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*. 18(4): 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.
- Asnawi, Ichsan M, & Haryani NKD. 2017. Nilai Nutrisi Pakan Ayam Ras Petelur yang Dipelihara Peternak Rakyat di Pulau Lombok. *Jurnal Sains Teknologi & Lingkungan*. 3(2):18-27. <https://doi.org/10.29303/jstl.v3i2.17>.
- Azhari A. 2000. Kemitraan Agribisnis Tiga Tungku. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. 15(2): 186-200.

- Ashari. 2009. *Optimalisasi Kebijakan Kredit Program Sektor Pertanian di Indonesia. Analisis Kebijakan Pertanian*. 7(1): 21-42. <https://doi.org/10.21082/akp.v7n1.2009.21-42>
- Aziz AR, Hamka MS, Bilyaro W, Dani M, & Wahidin. 2024. Optimalisasi Peluang Pertumbuhan: Analisis Strategis Pengembangan Usaha Peternakan Ayam Petelur di Kabupaten Rejang Lebong. *Journal of Agriculture and Animal Science*. 4(1): 33-40.
- Azizah N, Djaelani MA, & Mardiaty SM. 2018. Kandungan protein, indeks putih telur (IPT) dan haugh unit (HU) telur itik setelah perendaman dengan larutan daun jambu biji (*Psidium guajava*) yang disimpan pada Suhu 27° C. *Buletin Anatomi dan Fisiologi*. 3(1): 46-55.
- Azizah S. 2024. *Kemitraan Broiler di Indonesia: Tinjauan Komunikasi Pembangunan*. Yayasan Drestanta Pelita Indonesia. Semarang.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2023 Statistika Daerah Provinsi Lampung (Tahun 2022 & 2023). https://lampung.bps.go.id/id/publication/2022/09/26/b9373c67213d89221abf98b2/statistik-daerah-provinsi-lampung-2022.html?utm_source=chatgpt.com
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2024^a. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa), 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribuan-jiwa-.html>
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2024^b. Produksi telur ayam petelur menurut provinsi, 2021-2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDkxIzI=/produksi-telur-ayampetelurmenurut-provinsi.html>
- Badan Standardisasi Nasional. 2006. *SNI 01-3929-2006: Pakan Ayam Ras Petelur (Layer)*. Jakarta: BSN.
- Bank Indonesia. 2023. BI-rate tetap 5,75%: mempertahankan stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_278425.aspx.
- Barrett CB, Bachke ME, Bellemare MF, Michelson HC, Narayanan S, & Walker T F. 2012. Smallholder participation in contract farming: Comparative evidence from five countries. *World Development*. 40(4): 715–730. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2011.09.006>
- Baron RM & Kenny DA. 1986. The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. *Journal of Personality and Social Psychology*. 51(6): 1173–1182. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.51.6.1173>
- Bell DD & Weaver WD. 2002. *Commercial Chicken Meat and Egg Production*. 5th Ed. Springer Science and Business Media.

- Bijman J. 2008. Contract farming in developing countries: An overview. *Wageningen University Working Paper*. Wageningen University Department of Business Administration. <https://edepot.wur.nl/1763>
- Bitzer V. 2012. Partnering for Change in Chains: the Capacity of Partnerships to Promote Sustainable Change in Global Agrifood Chains. *International Food and Agribusiness Management Review*. 15(B): 13-38.
- Buchanan JR. 2014. *The theory of interest*. Millersville University. <https://sites.millersville.edu/rbuchanan/book/Interest.pdf>
- Byerlee, Derek R, Janvry D, Alain F, Klytchnikova, Irina I, Sadoulet, Marie LE, Townsend, & Robert. 2008. *World development report 2008: agriculture for development*. World Bank Group. Washington DC. <http://documents.worldbank.org/curated/en/587251468175472382>.
- Ceufin S, Prihatminingtyas B, & Asnah. 2020. Kelayakan Usaha pada Agribisnis Ayam Petelur Studi Kasus pada CV. Gali Putra Junrejo Malang. *Agridevina*. 9(1): 39–52.
- Checkland, P. 1981. *Systems Thinking, Systems Practice*. John Wiley & Sons. New York.
- Davis JH. & Goldberg RA. 1957. *A concept of agribusiness*. Boston, MA: Harvard University Press.
- Dewanto AA. 2005. Perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma pada peternak ayam potong/broiler di pemerintah Kabupaten Grobogan Jawa Tengah. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur. 2023. *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022*. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur.
- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Timur. 2023. *Buku profil perkembangan daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2023*. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
- Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner. 2023. *Pedoman Kesejahteraan Hewan pada Peternakan Ayam Petelur (Layer)*. Pertanian Press. Jakarta.
- Direktorat Pemasaran Domestik. 2012. Analisis pemasaran komoditas unggulan telur ayam ras petelur. Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Jakarta.
- Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan. 2019. Panduan Kemitraan Usaha Peternakan. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Jakarta.

- Doll JP & Orazem F. 1984. *Production Economics: Theory with Applications*. Wiley. New York.
- Downey WD & Erickson SP. 1987. *Agribusiness Management* (2nd ed.). New York. McGraw-Hill.
- Dyson RG. 2004. Strategic development and SWOT analysis at the University of Warwick. *European Journal of Operational Research*. 152(3): 631–640. [https://doi.org/10.1016/S0377-2217\(03\)00062-6](https://doi.org/10.1016/S0377-2217(03)00062-6)
- Eaton C & Shepherd AW. 2001. *Contract farming: Partnership for growth*. FAO Agricultural Service Bulletin No. 145. Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://www.fao.org/4/y0937e/y0937e00.pdf>
- Elkington J. 1997. *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Capstone Publishing. Oxford.
- Elkington J. 2018. 25 years ago I coined the phrase “triple bottom line.” Here’s why it’s time to rethink it. *Harvard Business Review*. 96(4): 1–8.
- Emerson K, Nabatchi T, & Balogh S. 2012. An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*. 22(1): 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>.
- Evans L & Meade R. 2006. *The Role and Significance of Cooperatives in New Zealand Agriculture, A Comparative Institutional Analysis*. Report Prepared for the New Zealand Ministry of Agriculture and Forestry. New Zealand Institute for the Study of Competition and Regulation. <https://core.ac.uk/download/pdf/153550997.pdf>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 2017. *Sustainable livestock development for food security and nutrition*. Rome: FAO.
- Gafaruddin A & Arfan OAD. 2025. Contract Farming Models and Their Implementation on Broiler Chicken Business Income in Nanga-Nanga District, Kendari City. *Jurnal Manajemen Dan Agribisnis*, 22(3), 389. <https://doi.org/10.17358/jma.22.3.389>
- Gittinger JP. 1982. *Economic analysis of agricultural projects* (2nd ed.). Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Githinji J. 2021. Assessing role of cooperative in promoting adoption of livestock vaccines in Kenya. <https://www.ilri.org/index.php/news/assessing-role-cooperatives-promoting-adoption-livestock-vaccines-kenya?>
- Golding P. & Murdock G. 1997. *The Political Economy of The Media Volume I*. United Kingdom. Edward Elgar Publishing Limited.
- Gujarati DN & Porter DC. 2009. *Basic econometrics*. 5th ed. McGraw-Hill/Irwin. <https://ucanapplym.s3.ap->

south1.amazonaws.com/RGU/notifications/E_learning/Online_study/Basic-Econometrics-5th-Ed-Gujarati-and-P.pdf.

- Gürel E & Tat M. 2017. SWOT analysis: A theoretical review. *The Journal of International Social Research*. 10(51): 994–1006. <http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2017.1832>
- Hair JF, Black WC, Babin BJ, and Anderson RE. 2014. *Multivariate Data Analysis*. 7th Edition. Pearson Education. Upper Saddle River.
- Hall A. 2005. Capacity development for agricultural biotechnology in developing countries: An innovation systems view. *Journal of International Development*. 17(5): 611-630.
- Hall D, Hirsch P, & Li TM. 2011. *Powers of exclusion: Land dilemmas in Southeast Asia*. Singapore: NUS Press.
- Hayes AF. 2022. *Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach* (3rd ed.). New York, NY: Guilford Press.
- Hernanto F. 1996. *Ilmu usaha tani*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Jackson H. 1968. Agribusiness Coordination: A Systems Approach to the Wheat, Soybean, and Florida Orange Economic. *American Journal of Agricultural Economics*. 50(3): 782-783. <https://doi.org/10.2307/1238290>.
- Hellin J, Lundy M, & Meijet M. 2009. Farmer organization, collective action and market access in Meso-America. *Food Policy*. 34(1): 16-22. <http://doi.org/10.1016/j.foodpol.2008.10.003>.
- Helms MM, & Nixon J. 2010. Exploring SWOT analysis—where are we now? A review of academic research from the last decade. *Journal of Strategy and Management*. 3(3): 215–251. <https://doi.org/10.1108/17554251011064837>.
- Hillman AJ, Withers MC, & Collins BJ. 2009. Resource dependence theory: A review. *Journal of Management*,. 35(6): 1404–1427. <https://doi.org/10.1177/0149206309343469>
- Ifeduba AV, Achonwa CC, Ukwu CP, Ogbuewu IP, Etuk EB, & Okoli IC. 2020. Commercial Intensive Poultry Production in Tropical Environments with Particular Reference to Nigerian Poultry Industry. *World Rural Observations* 12(3): 67-84.
- Ishak F, Wardhana IAR, Mutiara GA, Periyadi P, Meisaroh L, & Alfarisi MR. 2024. Improving the Productivity of Laying Hens Through a Modern Cage Cleanliness Monitoring System that Utilizes Integrated Sensors and IoT Technology. *Journal of Robotics and Control (JRC)*. 5(4): 992–1001. <https://doi.org/10.18196/jrc.v5i4.21610>

- Kamalia PU, Subroto WT, & Sakti NC. 2025. Bibliometric Analysis of Cooperatives Role in a Environmental Economy. *Asian Journal of Environmental Research*. 2(1): 1–15. <https://doi.org/10.69930/ajer.v2i1.261>.
- Kartasudjana dan Suprijatna. 2010. *Manajemen Ternak Unggas*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2019. Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2020. Pedoman Pengembangan Agribisnis Ayam Petelur. Jakarta: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Khairati R. & Syahni R. 2016. Respons permintaan pangan terhadap pertambahan penduduk di Sumatera Barat. *Jurnal Pembangunan Nagari*. 1(2): 19-36.
- Kolk A, van-Tulder R, & Kostwinder. 2008. Business and Partnerships for Development. *European Management Journal*. 26(4): 262-273. <https://ssrn.com/abstract=1086066>.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 2021. KPPU minta pemerintah efektifkan pengawasan untuk cegah integrator merugikan peternak. <https://kppu.go.id/blog/2021/12/kppu-minta-pemerintah-efektifkan-pengawasan-untuk-cegah-integrator-merugikan-peternak/>. Diakses tanggal 29 Juni 2022.
- Kozhaya R. 2020. A Systematic Review of Contract Farming, and its Impact on Broiler Producers in Lebanon. *Open Science Journal*. 5(1): 1-14. <https://osjournal.org/ojs/index.php/OSJ/article/viewFile/2410/302>.
- Kuncoro AAB, Sudiarto, & Indah PN. 2022. Efektivitas Kemitraan Peternak Sapi Perah dengan Koperasi Agribisnis Dana Mulya, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mokokerto. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH*. 9(2): 431-445.
- Kurniawan MFT, Darmawan DP, Astiti NWS. 2013. Strategi Pengembangan Agribisnis Peternakan Ayam Petelur di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Manajemen Agribisnis*. 1(2): 53-66.
- Leeson S. & summers JD. 2005. *Commercial Poultry Nutrition*. Third Edition, Nottingham University Press. Nottingham.
- Lubis DA. 1992. *Ilmu Makanan Ternak*. PT Pembangunan. Jakarta.
- MacKinnon DP. 2008. *Introduction to statistical mediation analysis*. New York, NY: Lawrence Erlbaum Associates.
- Maryudi A & Nurrochmat DR. 2007. Kemitraan dalam Pengembangan Agribisnis. *Jurnal Manajemen dan Agribisnis*. 4(2): 85-95.

- Menteri Pertanian Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Pertanian No. 18/Permentan/PK.210/4/2020 tentang Pedoman Pengembangan Korporasi Peternakan Rakyat.
- Milenia YR, Madyawati SP, Achmad AB, Damayanti R. 2022. Evaluasi Puncak Produksi Ayam Petelur Strain Lohman Brown di CV. Lawu Farm Malang. *Journal of Applied Veterinary Science and Technology*. 03: 12-17. <http://doi.org/10.20473/javest.V3.01.2022.12-17>
- Morris ST. 2009. Economic Evaluation of Beef Farming Systems. Meat and Livestock Australia.
- Narayanan S. 2014. Profits from participation in high value agriculture: Evidence of heterogeneous benefits in contract farming schemes in India. *Food Policy*. 44: 142–157. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2013.10.010>
- Nazir M. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- North MO & Bell DD. 1990. *Commercial Chicken Production Manual*. Van Nostrand Reinhold. New York.
- Novita, Ivan's E, Sari NA. 2023. Strategi Pengembangan Peternakan Ayam Petelur Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Peternakan*. 26(2): 116-123. <http://doi.org/10.22437/jiiip.v26i2.28844>
- Nurcholis D, Hastuti B, Sutiono. 2009. Tatalaksana pemeliharaan ayam ras petelur periode layer di populer farm desa Kuncen kecamatan Mijen kota Semarang. *Jurnal ilmu-ilmu pertanian*. 5(2): 38 – 49.
- Paly B. 2011. *Metode Pengukuran Efisiensi dan Produktivitas Usahatani*. UIN Alauddin Press. Makassar.
- Pasaribu SM. 2025. Program Kemitraan dalam Sistem Pertanian Terpadu. *Analisis Kebijakan Pertanian*. 3(1): 39-53. <https://doi.org/10.21082/akp.v13i1.39-54>
- Pemerintah Republik Indonesia. 2012. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*. Jakarta. Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. *Undang-undang Nomor 5 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta. Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang No 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan*. Jakarta. Indonesia.
- Pfeffer J & Salancik G. 1978 *The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective*. Harper & Row, New York.

- Prasetyo E, Mukson, Mardiningsih D, Dwidjatmiko S, Ekowati T, Sumekar W, Marzuki S. 1999. Penerapan Manajemen Agribisnis Peternakan. Makalah Pengabdian Masyarakat. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Pretty J. 2003. Social capital and the collective management of resources. *Science*. 302(5652): 1912–1914. DOI: 10.1126/science.1090847.
- Priyatno, 2004. *Membuat Kandang Ayam*. Cetakan ke-8. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. 2022. Outlook Komoditas Peternakan Peternakan Telur Ayam Ras Petelur. Sekretariat Jenderal-Kementerian Pertanian.
- Putnam RD, Leonardi R, & Nonetti RY. 1993. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctt7s8r7>
- Putri NN, Salam S, & Fitriyah AT. 2024. Analisis pendapatan usaha ternak ayam ras petelur: Studi kasus CV. Zidan Farm. Pallangga: *Journal of Agriculture Science and Research*. 2(2): 75-78.
- Ralph A, Peter Q, Festus T, Emmanuel A, Butu M, & Ellen HN. 2025. Interlinkages Between Agri-Food Trade and the SDGs at the Global, Regional and Local Level. *J. Int. Dev.*37: 951-977. <https://doi.org/10.1002/jid.3994>
- Rastana IDG, Rusdianta IGM, & Guna INA. 2020. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Peternak Ayam Petelur di Desa Selanbawak Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan. *Majalah Ilmiah Untab*. 17(2): 158-163.
- Rasyaf M. 2002. *Beternak Ayam Petelur*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Rawls J. 1971. *A theory of justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Rernawan E. 2011. *Organization culture, budaya organisasi dalam perspektif ekonomi dan bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Ribot JC & Peluso NL. 2003. A theory of access. *Rural Sociology*. 68(2): 153–181. <https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x>
- Rifa'i, Amam, Surjowardojo P, Susilorini TE. 2021. Morfometri kambing Senduro plasma nuftah Kabupaten Lumajang. *Buletin Plasma Nuftah*. 27 (2): 133-140.
- Ross S.A, Westerfield RW, & Jordan BD. 2019. *Fundamentals of corporate finance* (12th ed.). McGraw-Hill Education.
- Saragih B. 2001. Pengembangan Agribisnis dalam Perspektif Kemitraan. *Jurnal Agro Ekonomi*. 19(2): 101-114.

- Saragih B. 2011. *Agribisnis: Paradigma baru pembangunan ekonomi berbasis pertanian*. Bogor: IPB Press.
- Sari ML & Herdiyana. 2017. Manajemen Perkandangan Ayam Petelur Afkir di Breeding Farm PT. Vista Agung Kencana Farm 2 Desa Talang Taling Kecamatan Gelumbang Muara Enim. *Jurnal Peternakan Sriwijaya*. 6(2): 100-106.
- Sasongko & Prasasta H. 2018. Adaptasi Peternak Ayam Ras Petelur dalam Menghadapi Gejolak di Pasar Input dan Output (Studi pada Peternakan Rakyat Ayam Ras Petelur di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.
<http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/4690/4117>.
- Scott ML, Nesheim MC, & Young RJ. 1982. *Nutrition of Chicken*. 3th Ed. ML. Scott Association. New York.
- Sen A. 1999. *Development as freedom*. New York, NY: Alfred A. Knopf.
- Sejati WK. 2016. Analisis Kelembagaan Rantai Pasok Telur Ayam Ras Peternakan Rakyat di Jawa Barat. *Analisis Kebijakan Pertanian*. 9(2): 183-198. <https://doi.org/10.21082/akp.v9n2.2011.183-198>.
- Sirmon DG, Hitt MA, & Ireland RD. 2007. Managing firm resources in dynamic environments to create value: Looking inside the black box. *Academy of Management Review*. 32(1): 273–292.
<https://doi.org/10.5465/amr.2007.23466005>
- Sudarmono AS. 2003. *Pedoman Pemeliharaan Ayam Ras Petelur*. Kanisius. Yogyakarta.
- Sudradjat & Riyanti L. 2019. *Nutrisi dan Pakan Ternak*. Pusat Pendidikan Pertanian. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Sudarwati L & Nasution NF. 2024. Upaya Pemerintah dan Teknologi Pertanian dalam Meningkatkan Pembangunan dan Kesejahteraan Petani di Indonesia. *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan*. 3(1): 1–8.
<https://doi.org/10.32734/jkakp.v3i1.15847>.
- Sugiarto AA, Dinaloni D, Sudarwati N, & Amri F. 2025. The Role of Agricultural Cooperatives in Prospering Farming Communities. *Jurnal Ilmiah Inovasi*. 25(2): 99-106. <https://doi.org/10.25047/jii.v25i2.5773>.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Sumardjo A. 2009. Kemitraan Usaha dalam Agribisnis. *Jurnal Agribisnis dan Pengembangan Wilayah*. 1(1): 21-30.

- Suprijatna E, Atmomarsono U, & Kartasudjana R. 2005. *Ilmu Dasar Ternak Unggas*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Suryana A. 2017. *Korporasi Peternakan Rakyat: Membangun Kemandirian Ekonomi Pedesaan*. Jakarta: Badan Penerbit dan Publikasi Universitas Indonesia.
- Sutanto A, Rakhman A, Afriliana I, Hernowo R, Eko Nugroho W, & Fayruz M. 2024. Narrowband IoT in Livestock Farming: A Technological Innovation for Productivity and Sustainability. *International Journal of Science, Technology & Management*. 5(5): 1291-1297. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v5i5.1030>
- Susilorini TE, Sawitri, ME, & Muharlieni. 2009. *Budi Daya 22 Ternak Potensial*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Sustainable Agriculture Initiative Platform. 2014. *Principles and practices for sustainable animal production*. Brussels: SAI Platform.
- Tampubolon M, Fitriani, Anggraini N. 2024. Pola Hubungan Kemitraan Inti Plasma pada Usaha Peternakan Ayam Petelur di CVBF Desa Talang Jawa Kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan. *Jurnal Manajemen Agribisnis Terapan*. 2(1): 1-8. <https://doi.org/10.25181/jumaat.v2i1.3617>
- Tilman AD, Hartadi H, Reksohadiprojo S, Kusumo SP, & Lebdosoekojo S. 1991. *Ilmu makanan Ternak Dasar*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Uzzi B. 1997. Social structure and competition in interfirm networks: The paradox of embeddedness. *Administrative Science Quarterly*. 42(1): 35–67. <https://doi.org/10.2307/2393808>.
- Valentin EK. 2015. SWOT analysis from a resource-based view. *Journal of Marketing Theory and Practice*. 9(2): 54–69. <https://doi.org/10.1080/10696679.2001.11501891>
- Vlaicu PA, Untea AE, Oancea AG. 2024. Sustainable Poultry Feeding Strategies for Achieving Zero Hunger and Enhancing Food Quality. *Agriculture*. 14(10): 1811. <https://doi.org/10.3390/agriculture14101811>.
- Wambu C & Gichuki C. 2023. Leveraging on Agricultural Cooperatives in Feed and Fodder Production Among Smallholder Dairy Farmers in Meru County, Kenya. *Journal of the Kenya National Commission for UNESCO*. 5(1): 1-18. <https://doi.org/10.62049/jkncu.v5i1.180>
- Warsito SH. 2010. Analisis Finansial, Resiko dan Sensitivitas Usaha Peternakan Ayam Petelur. *Tesis*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Wehrich H. 1982. The TOWS Matrix—A Tool for Situational Analysis. *Long Range Planning*. 15(2): 54–66. [https://doi.org/10.1016/0024-6301\(82\)90120-0](https://doi.org/10.1016/0024-6301(82)90120-0)

- Widayanto I, & Aji AS. 2025. Designing an IoT-Based Food Monitoring Application for Chicken Farming. *Journal of Scientific Research, Education, and Technology (JSRET)*. 4(1): 12–26.
- Widyanto & Santoso TA. 2024. *Buku Ajar Pengantar Kewirausahaan*. Unika Atma Jaya.
- Wood DJ & Gray B. 1991. Toward a comprehensive theory of collaboration. *Journal of Applied Behavioral Science*. 27(2): 139–162. <https://doi.org/10.1177/0021886391272001>
- Wulandari Z & Arif II. 2022. Review: Tepung Telur Ayam: Nilai Gizi, Sifat Fungsional dan Manfaat. *Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan*. 10 (2): 62-68. <https://doi.org/10.29244/jipthp.10.2.62-68>.
- Wulandari FT & Zakaria H. 2025. *Kebijakan Pembangunan Pertanian dan Pedesaan di Indonesia*. *Empiricism Journal*. 6(3): 1281-1294. <https://doi.org/10.36312/ej.v6i3.2941>.
- Yaqin M, Fanani Z, Hartono B, & Nugroho BA. 2021. Pengembangan usaha ternak ayam pedaging sistem kemitraan bagi hasil berdasarkan aksesibilitas peternak terhadap sumber daya. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Peternakan Tropis*. 6(2): 146-153. <http://dx.doi.org/10.33772/jitro.v6i2.5578>.
- Yulianto H, Wahyudi P, Jaelani A. 2023. *Pedoman Kesejahteraan Hewan Pada Peternakan Ayam Petelur (Layer)*. Pertanian Press. Tim Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner. Jakarta.
- Yusdja Y dan Nasution A. 1993. Formulasi Dan Analisis Harga Pokok Bibit Serta Harga Maksimum Bibit Dan Pakan Pada Usaha Ternak Ayam Ras Petelur. *Jurnal Agro Ekonomi*. 12(1): 29-47. <http://doi.org/10.21082/jae.v12n1.1993.29-47>.
- Yuwanta T. 2010. *Telur dan Kualitas Telur*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.